

BAB III

GERAKAN PERLAWANAN IBNU HADJAR (1950–1963)

A. Biografi Ibnu Hadjar Dan Kiprahnya

Kalimantan memiliki sejarah panjang, terutama pada masa Proklamasi Kemerdekaan. Walaupun saat itu tentara Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, namun pejabat Jepang tetap merahasiakan berita tersebut dan berharap masyarakat Indonesia tidak mengetahuinya. Mereka beranggapan bahwa rakyat Indonesia akan menganggap bahwa kemerdekaan adalah pemberian dari Jepang. Menguasai Kalimantan berarti berhasil menyelesaikan kebutuhan logistik yang akan dibutuhkan karena kekayaan Kalimantan tidak terhingga dan bahan bakunya banyak, seperti minyak bumi, karet, batu bara, mangan, besi, emas dan intan.

Bagi penjajah, Kalimantan dipandang sebagai pulau penuh potensi dan harapan. Namun, dorongan untuk merdeka melahirkan semangat perlawanan dari para pejuang yang bercita-cita mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan impian seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1940-an, gerakan pemuda Dayak tumbuh di Kalimantan Selatan. Pemikiran para intelektual muda ini dituangkan dalam bentuk publikasi atau propaganda dan menonjolkan persatuan dan kesukuan Dayak. Pembahasan tentang arah gerakan Dayak Pakat yang menitikberatkan pada gerakan di dalam kelompok dan membuka diri terhadap kegiatan gerakan nasional yang lebih luas menunjukkan keragaman pemikiran di dalam organisasi. Ini dimuat dalam Soeara Pakat edisi tahun 1940-an.

Seiring dengan masa pergerakan, nama Ibnu Hadjar atau Haderi bin Umar mengakomodir mantan tentara yang merasa dikhianati oleh penguasa melalui organisasi gerilya Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRjT). Ibnu Hadjar, yang memiliki nama asli Haderi, lahir pada April 1920 di Ambutun, Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ia merupakan putra dari Umar dan Siti Hadijah, yang berasal dari keluarga kepala suku Dayak di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Ia memiliki seorang adik bernama Dardiansjah. Dia menikah dua kali.¹ Dari istri pertama memiliki seorang putra bernama Rafi'i. Istri kedua berasal dari Buntok. Dibalik sosoknya yang tangguh dan pemberani, Ibnu Hadjar juga merupakan sosok yang alim dan berilmu agama. Dia mengajar membaca Alquran dan kitab Perukunan Melayu oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datuk Kalampayan), seorang ulama dan mufti Kesultanan Banjar dari sekte Syafi'i. Aura kharismatik yang melekat pada Ibnu Hadjar dengan menjadi pemuka agama Islam sehingga sebagian masyarakat di desanya bersimpati kepadanya.² Pada masa sebelum kemerdekaan, Ibnu Hadjar menghabiskan waktunya bekerja sebagai petani dan pencari madu. Setelah itu, Ibnu Hadjar memutuskan untuk berkiprah di bidang kemiliteran. Ibnu Hadjar bergabung dengan Divisi IV TNI AL dan lulus dengan pangkat Letnan Dua. Sebagai seorang prajurit, sudah menjadi tugas Ibnu Hadjar untuk menumpas penjajah, salah satunya berperang melawan Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya,

¹ Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krtj) di Kalimantan Selatan (1950-1963)."

² Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 13.

beliau adalah orang biasa yang memiliki rasa cinta tanah air, rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui sarana perjuangan yaitu Divisi IV TNI Angkatan Laut. Perjuangan ini merupakan dedikasinya untuk mengintegrasikan Kalimantan Selatan dan bagian tenggara Kalimantan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang perjuangan kemerdekaan nasional antara tahun 1949 dan 1950, daerah Hulu Sungai di Kalimantan Selatan menjadi benteng perlawanan anti Belanda. Oleh karena itu, pasukan Ibn Hadjar, seperti pasukan Abdul Kahar Mudzakkar, sebagian besar terdiri dari mantan pejuang gerilya yang kecewa dengan cara mereka diperlakukan setelah tahun 1949.³ Semangat nasionalisme, patriotisme, dan gerakan cinta tanah air memotivasi dirinya untuk berjuang bersama Hasan Basry melalui platform perjuangan, yakni Divisi IV TNI Angkatan Laut. Perjuangan ini merupakan dedikasinya untuk mengintegrasikan Kalimantan Selatan dan bagian tenggara Kalimantan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibnu Hajdar adalah salah satu pasukan tempur bersama Martinus, H. Damanhuri, Daeng Lajida, Pambalah Batung, Bung Hasan, dan Abdurrahman. Pasukan ini diberi nama RX-8 Markas Besar Organisasi Pemberontak Indonesia (SOPIK) Kalteng yang merupakan nama samaran Divisi IV (A) TNI Angkatan Laut Pertahanan Kalimantan. Pemimpin umumnya adalah Hassan Basry.⁴ Pada penghujung 1949, pemerintah mengadakan program reorganisasi terhadap divisi-divisi TNI

³ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 218.

⁴ Seman, "Lahirnya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan," 2004, 14–15.

dan ALRI IV termasuk dalam program tersebut. Anggota-anggota yang dianggap kurang memenuhi syarat untuk bergabung dengan TNI dihentikan. Kekecewaan juga dirasakan para gerilyawan terhadap kebijakan pemerintah yang menempatkan figur dari luar Kalimantan dalam posisi strategis di ALRI Divisi IV. Ibnu Hadjar sendiri termasuk salah satu yang terdampak rasionalisasi dan reorganisasi, karena keterbatasannya dalam hal kemampuan baca tulis.⁵

Menurut Nugroho Notosusanto, kebijakan peleburan TNI dilatarbelakangi oleh visi Perdana Menteri Mohammad Hatta untuk mentransformasi TNI dari tentara rakyat dan revolusioner menjadi pasukan profesional bergaya Barat. Pada 1948, Kabinet Hatta menggagas program reorganisasi dan rasionalisasi guna merapikan struktur angkatan bersenjata serta meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, khususnya di tubuh Angkatan Darat. Langkah ini secara perlahan menggeser peran tentara rakyat yang belum memiliki latar belakang pendidikan militer. Untuk mendukung profesionalisasi, pemerintah melibatkan Misi Militer Belanda (NMM) dalam pelatihan TNI. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketegangan internal dan konflik psikologis, karena dianggap mendiskreditkan para pejuang rakyat.

Dalam sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah sebagai bagian dari NKRI, selain tokoh-tokoh besar seperti Hassan Basry dan Aberani Sulaiman, nama Ibnu Hadjar juga dikenal luas. Di kalangan masyarakat Hulu Sungai,

⁵ Matanasi, *Sejarah Tentara*, 172–77.

khususnya di Barabai dan Kandangan, Ibnu Hadjar merupakan figur legendaris yang dihormati, baik oleh pengikutnya maupun lawan-lawannya. Ibnu Hadjar dikenal sebagai tokoh pemberani dan memiliki pengaruh kuat di Kalimantan Selatan. Bagi sebagian masyarakat setempat, ia dianggap sebagai pejuang kemerdekaan, terutama karena keterlibatannya bersama Brigjen Hasan Basry dan tokoh lainnya dalam perjuangan melawan penjajah. Namun, karena terlibat dalam gerakan perlawanan bersenjata, ia tidak pernah diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Kekecewaannya terhadap kondisi pasca-kemerdekaan, khususnya penempatan tokoh luar Kalimantan dalam posisi strategis dan dampak rasionalisasi militer, mendorongnya membentuk Serikat Rakyat Tertindas (SRT) di wilayah Hulu Sungai.

Pada Maret 1950, Ibnu Hadjar dan sekitar 60 pengikutnya menyerang pos TNI, yang kemudian menarik lebih banyak simpatisan hingga jumlahnya mencapai 250 orang. Pemerintah sempat mencoba pendekatan damai melalui musyawarah dan menawarkan rekonsiliasi, yang sempat diterima oleh Ibnu Hadjar. Namun, setelah memperoleh kembali perlengkapan militer, ia melarikan diri dan melanjutkan perlawanan dengan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRjT), sebagai bentuk kekecewaan eks gerilyawan yang merasa perjuangannya diabaikan, meskipun tetap mengklaim membela Pancasila dan kemerdekaan.

Serangan pertama pasukan Ibnu Hadjar terjadi di Kandangan pada November 1950. Meski sempat terdesak akibat diberlakukannya status darurat perang pada 1951, kondisi berubah ketika status tersebut dicabut pada Juli

1952. Pencabutan ini dimanfaatkan oleh Ibnu Hadjar untuk meningkatkan intensitas serangan gerilya yang menyebabkan kerugian besar. Kartosuwiryo kemudian melihat KRJT dan Ibnu Hadjar sebagai sekutu potensial, mengirim Sanusi Partawidjaja untuk membentuk Komando Teritorial VI TII di Kalimantan dan menjadikannya wilayah de facto Negara Islam. Pada 1954, Ibnu Hadjar resmi bergabung dengan TII dan diangkat sebagai Panglima Wilayah Kalimantan. Ia memperkuat identitas Islam dalam pasukannya, mengganti nama menjadi Kepala Pasukan Islam (KAPAI), menamai markasnya "Istana Islam Merdeka", dan bahkan mengubah lirik lagu Indonesia Raya sesuai visi negara Islam. Serangan besar kembali dilancarkan ke Barabai (April 1955) dan Kotabaru (November 1955). Efektivitas serangan tersebut menimbulkan keresahan, hingga Persatuan Pengusaha Bus Kalimantan mengancam menghentikan operasional jika keamanan tidak segera dipulihkan.⁶

Meski dianggap pemberontak oleh pemerintah pusat, gerakan Ibnu Hadjar di mata masyarakat lokal mencerminkan perlawanan atas ketidakadilan dan tuntutan pengakuan identitas masyarakat Kalimantan Selatan dalam bingkai NKRI. Pejuang Ibnu Hadjar sebagai buku pelajaran sejarah lokal telah memberikan gambaran yang jelas cukup lengkap tentang bagaimana sikap orang Banjar dalam kesetiiaannya mempertahankan kesabaran dan tanggung jawab terhadap negara dan tugas moral yang diberikan kepadanya terutama dalam mempertahankan wilayahnya.

⁶ Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krtj) di Kalimantan Selatan (1950-1963)."

B. Pendapat Tokoh Tentang Ibnu Hadjar

Ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh tentang gerakan Ibnu Hadjar, yaitu:

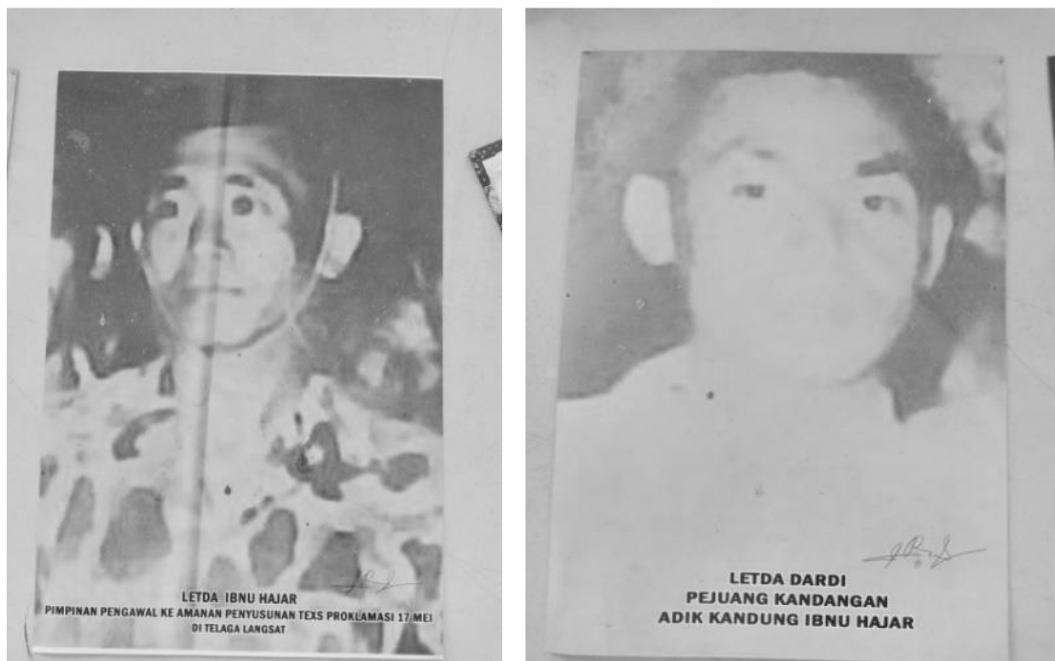
1. Yusri Darmadi

Yusri Darmadi (yusri.darmadi@gmail.com) lahir di Dumai (Riau), 30 Juli 1981. Menempuh pendidikan S-1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Ilmu Sejarah. Pada tahun 2014 diterima sebagai Pengelola Data Nilai Budaya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak. Pengetahuan mengenai Ibnu Hadjar umumnya masih terbatas, di mana ia kerap hanya dikenal sebagai tokoh utama KRjT yang terlibat dalam gerakan pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan. Pernahkah kita bertanya lebih dalam tentang alasan di balik tindakan "pemberontakan" yang dilakukannya. Apakah benar bahwa kelompok yang ia pimpin (KRjT) dihubungkan dengan DI/TII di Kalimantan. Siapa sebenarnya sosok Ibnu Hadjar yang dengan berani melakukan perlawanan terhadap negara, walaupun dia menyadari risikonya? Bagaimana pemikiran dan tindakannya yang berani mempertaruhkan segala sesuatu demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ibnu Hadjar, yang lahir dengan nama Haderi pada April 1920 di Ambutun, Telaga Langsat, Kalimantan Selatan, merupakan putra dari Umar dan Siti Hadijah, cucu seorang tokoh Dayak di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Dardiansjah. Sepanjang hidupnya, ia menikah dua kali; dari pernikahan pertama, ia dikaruniai seorang

putra bernama Rafi'i, sementara istri keduanya berasal dari Buntok.⁷ Sejak kecil, Ibnu Hadjar dikenal sebagai anak yang tangguh dan pemberani. Ia sering terlibat dalam perkelahian dan hampir selalu keluar sebagai pemenang. Di sela aktivitasnya, ia membantu orang tua dengan bertani, berkebun, dan berburu di kawasan hutan Pegunungan Meratus.⁸ Pendidikan dasarnya hanya sampai kelas 5 di Angkinang. Ibnu Hadjar memiliki postur tubuh yang kekar, tinggi sekitar 165 cm, dengan mata yang sipit, kulit yang cerah, dan alis yang panjang, serta berbicara dengan lembut.

Gambar 3.1 Ibnu Hadjar dan Adiknya



Di balik sosoknya yang tegas dan berani, Ibnu Hadjar dikenal memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam. Ia kerap membimbing masyarakat dalam membaca Al-Qur'an serta mengajarkan Kitab Perukunan Melayu karya

⁷ Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krjt) di Kalimantan Selatan (1950-1963)," 111.

⁸ Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 7–8.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang ulama dan mufti terkemuka di Kesultanan Banjar yang menganut mazhab Syafi'i. Karisma yang dimiliki Ibnu Hadjar menjadikannya sosok penting dalam komunitas Islam, sehingga banyak orang di desa tempat tinggalnya yang memiliki rasa saling simpati terhadap dirinya.⁹ Sebelum Jepang menduduki, Ibnu Hadjar menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai petani sekaligus pengumpul madu yang terampil.¹⁰ Dalam upaya mengumpulkan madu, ia melakukannya sendirian dengan memanjat pohon yang terdapat sarang lebah untuk mengambil madu, meskipun cukup berisiko untuk melakukannya sendiri di pohon yang ada sarang lebah. Ia tidak menguasai huruf Latin, hanya mampu membaca huruf Arab dan Arab Melayu.

Wilayah Hulu Sungai menjadi basis perlawanan terhadap Belanda pasca-1949, dengan pasukan Ibnu Hadjar yang sebagian besar terdiri dari mantan gerilyawan yang kecewa pada perlakuan pemerintah setelah kemerdekaan.¹¹ Ibnu Hadjar bergabung dengan ALRI Divisi IV bersama Hasan Basry untuk memperjuangkan penyatuan Kalimantan Selatan dan Tenggara ke dalam NKRI.¹² Ibnu Hadjar tergabung dalam kelompok tempur bersama Martinus, H. Damanhuri, Daeng Lajida, Pambalah Batung, Bung Hasan, dan Abdurrahman. Mereka dikenal sebagai Markas Besar RX-8 Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), yang merupakan nama samaran dari ALRI

⁹ Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 13.

¹⁰ Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krajt) di Kalimantan Selatan (1950-1963)," 111.

¹¹ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 218.

¹² Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 22.

Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Pimpinan umum dari pasukan ini adalah Hassan Basry.¹³ Kelompok ini memainkan peran krusial dalam peristiwa Proklamasi tanggal 17 Mei 1949.

Kesepakatan untuk membentuk komite pemerintahan militer dimulai dengan serangkaian pertemuan rahasia. Pertemuan pertama digelar di Durian Rabung, Padang Batung, pada 7 Mei 1949 dipimpin oleh Gusti Aman, diikuti pertemuan kedua pada 9 Mei 1949 di rumah H. Abdul Kadir yang dipimpin oleh H. Aberani Sulaiman. Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan lembaga pemerintahan militer dengan Hasan Basry sebagai gubernur militer. Setelah mendapat kabar situasi tidak aman, rapat dibubarkan dan Ibnu Hadjar bersama Setia Budi ditugaskan menjaga keamanan. Menjelang 16 Mei 1949, H. Aberani Sulaiman dan para tokoh menyusun naskah proklamasi di Limau Gampang, dengan pengawalan pasukan Ibnu Hadjar. Naskah ini kemudian dibacakan oleh Hasan Basry pada 17 Mei 1949 di Mandapai.¹⁴

Pada 24 Agustus 1949 terjadi pertempuran antara pasukan Ibnu Hadjar dan tentara KNIL. Saat malam menjelang, Ibnu Hadjar berdiri di depan pagar kawat berduri yang mengelilingi tangsi KNIL di Kandangan, menyerukan agar pasukan KNIL menyerah. Tak lama kemudian, bendera Merah Putih perlahan dikibarkan di tiang bendera markas tersebut, berkibar megah di langit senja.¹⁵ Pada 1 November 1949, ALRI Divisi IV secara resmi dilebur ke dalam Kesatuan Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat di bawah komando

¹³ Seman, *Lahirnya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan*, 14–15.

¹⁴ Seman, *Lahirnya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan*, 56–57.

¹⁵ Zamzam, *Zafry Zamzam*, 47.

Letnan Kolonel Hassan Basry. Restrukturisasi ini dilakukan berdasarkan Piagam Nomor 518/49 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 November 1949. Upacara pelantikan dilaksanakan di Kandangan pada 10 November 1949, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala yang membacakan amanat tertulis dari Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Posisi Kepala Staf Divisi dipercayakan kepada H. Aberani Sulaiman, yang memimpin empat kompi dengan komando sebagai berikut:

- a. Brigade I dipimpin Kapten Mulyono;
- b. Brigade II dikomandoi Letnan Ibnu Hadjar;
- c. Brigade III berada di bawah Kapten Martinus;
- d. Brigade Pelajar sementara dipimpin Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala.

Brigade Pelajar ini berfungsi sebagai penyatu bagi berbagai organisasi perjuangan pelajar yang sebelumnya terpisah. Untuk memperkuat struktur organisasi, Delegasi Militer RI mendatangkan seorang perwira dari Tentara Pelajar (TP) di Yogyakarta, yakni Letnan II Sutomo. Ibnu Hadjar dan Ma'rufi Utir mengambil posisi sebagai pemimpin Pasukan Inti Tengah dalam Resimen II Tengah. Integrasi ALRI Divisi IV ke Divisi Lambung Mangkurat memicu konflik internal. Pada 14 Januari 1950, Letnan H. Damanhuri dan Achmad Zakaria ditangkap karena diduga memicu pemberontakan. Kerusuhan pun terjadi di Birayang, dan sekitar 300 orang ditahan. Mereka dinyatakan berupaya menyusup ke dalam militer dengan elemen pemberontak dan

menyelenggarakan pelatihan militer di desa-desa. Baik Hassan Basry maupun Sukanda Bratamenggala menegaskan bahwa isu sekitar Divisi Tengkorak Putih hanya mewakili bagian kecil divisi yang masih berjuang. Dalam menjalankan kegiatannya, mereka menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak mengganggu stabilitas maupun ketertiban wilayah. Divisi Tengkorak Putih pun telah menunjukkan integrasinya secara nyata ke dalam struktur resmi angkatan bersenjata.¹⁶

Pasukan Tengkorak Putih berperan dalam penangkapan mata-mata musuh, termasuk yang ditangkap oleh anggota ALRI Divisi IV. Amis A. dan Ibnu Hadjar, keduanya anggota ALRI, pernah menyerahkan mata-mata Belanda kepada Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung.¹⁷

Pada 28 Januari 1950, Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala, yang merupakan Komandan Teritorium IV, menerima satu kompi bekas KNIL yang terdiri dari 100 orang infanteri, yang dipimpin oleh Letnan Satu Sualang, serta satu kompi tambahan yang dipimpin oleh Letnan Kotton. Sejumlah eks anggota KNIL yang masuk APRIS mendapat posisi strategis sebagai pelatih atau komandan serta kenaikan pangkat, sementara banyak mantan pejuang gerilya hanya ditempatkan sebagai prajurit berpangkat rendah. Mereka harus melewati tahapan pemeriksaan kesehatan dan seleksi. Karena keterbatasannya

¹⁶ Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krijt) di Kalimantan Selatan (1950-1963)," 108.

¹⁷ Wajidi, *Gerakan Tengkorak Putih*, 54–55.

dalam membaca huruf Latin, Ibnu Hadjar mengalami penurunan pangkat, sebagaimana yang juga dialami oleh ratusan orang lainnya.¹⁸

Hassan Basry menyatakan, "Sementara ini bukan pertempuran antara Indonesia dan Belanda, melainkan konflik antara mereka yang kecewa dengan aparat pemerintah yang, setelah kedaulatan dialihkan, sebagian besar anggotanya berasal dari mantan KNIL dan sekutu Belanda."¹⁹ Pandangan serupa muncul dalam pengakuan Djohan Effendi di dalam biografinya yang berikut ini. "Djohan mengingat ada orang tua yang mengatakan, setelah Belanda menjajah, Kalimantan dijajah oleh Jawa. Sejak awal tahun 1950-an, mantan tentara Divisi IV ALRI yang masih bertugas di angkatan bersenjata menerima kompensasi yang jauh berbeda dibandingkan rekan-rekan mereka di Jawa; sedangkan mereka yang telah di demobilisasi tidak diakui sebagai veteran dan tak mendapatkan pensiun.

Pemberontakan yang dipimpin oleh Letnan Dua Ibnu Hajar muncul sebagai bentuk akumulasi ketidakpuasan dan perasaan terkhiat oleh otoritas pusat. Melalui organisasi gerilya KRjT, Ibnu Hajar menampung para mantan prajurit yang merasa dirugikan. Ia kemudian memimpin perlawanan di daerah Kandangan. Tindakan perlawanan mereka kepada pemerintah pusat diikat oleh semangat Islam, sebab agama ini sangat berperan dalam menyatukan perasaan masyarakat Banjar. Konsep negara Islam sering kali dibahas di langgar-langgar (mushala) tempat Ibnu Hajar membangkitkan semangat para gerilyawan;

¹⁸ Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 46.

¹⁹ Zamzam, *Zafry Zamzam*, 47.

kendati dokumen yang menunjukkan adanya gambaran nyata tentang ide negara Islam versi Ibnu Hajar sejatinya tidak pernah ada. Koneksi antara gerakan Ibnu Hajar dengan gerakan DI di Jawa Barat menjadi penting setelah beberapa syarat yang diajukan Ibnu Hajar untuk mencapai perdamaian diabaikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, gagasan negara Islam yang diperkenalkan oleh pasukan DI dengan mudah bersatu dalam gerakan Ibnu Hajar."²⁰

Menganalisis kehidupan Ibnu Hadjar, dapat disimpulkan bahwa dia adalah sosok biasa yang memiliki rasa cinta bangsa yang mendalam, dan siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Dorongan nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan jiwa patriotisme membawanya turut berjuang bersama Hasan Basry melalui wadah perjuangan ALRI Divisi IV. Langkah ini mencerminkan komitmennya dalam memperjuangkan penyatuan Kalimantan Selatan dan wilayah tenggara Kalimantan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Konfrontasi terjadi ketika ia memperjuangkan keadilan terhadap pemerintah pusat akibat proses rasionalisasi dan seleksi administrasi di tubuh militer yang tidak memenuhi harapan para pejuang. Pemerintah Orde Lama memiliki alasan rasionalisasi untuk para pejuang lokal yang kurang memahami huruf Latin. Padahal, mereka sejatinya bisa membaca, meski hanya dalam huruf Arab dan Arab Melayu. Oleh sebab itu, dia mengakomodasi

²⁰ Ahmad Gaus A. F., *Sang pelintas batas*, 20–21.

²¹ Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 22.

ketidakpuasan para pejuang dalam organisasi Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT).

Kita dapat menilai Ibnu Hadjar dari perspektif dirinya saat menghadapi pertentangan ideologi dengan pemerintah pusat. Dia telah mengamati, merasakan, menganalisis, dan kemudian mengambil sikap terhadap persoalan yang dihadapinya serta yang dialami oleh para pengikutnya. Dominasi pusat yang semakin kuat sering kali mengesampingkan kepentingan rakyat daerah, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Karena itu, gerakan Ibnu Hadjar perlu dipahami juga dari perspektif lokal agar makna revolusi nasional lebih utuh.²²

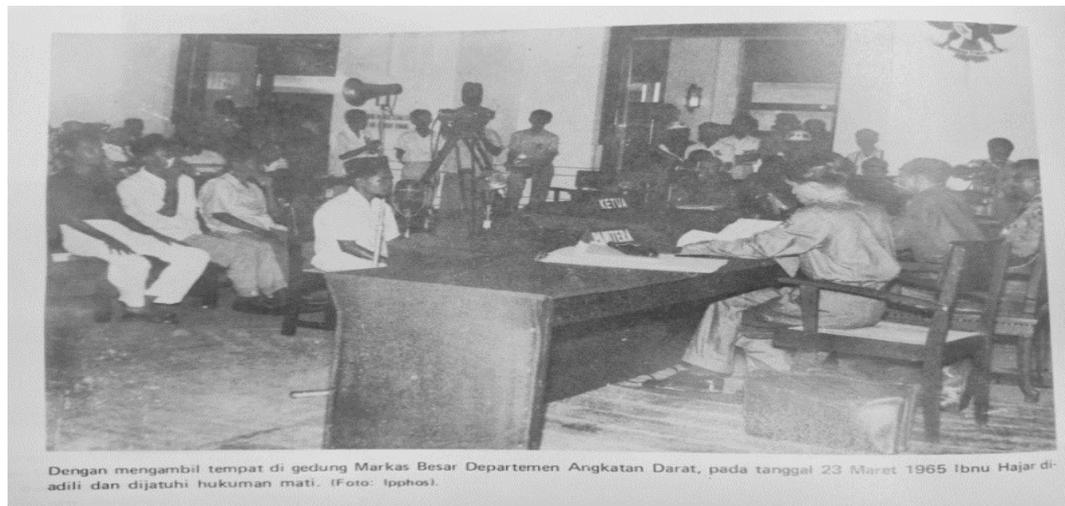
Ketika menyerah, Ibnu Hadjar tetap menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik dengan Malaysia. "Sekali lagi, Ibnu Hajar menunjukkan bahwa aksinya selama ini sebenarnya bukan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Beberapa waktu setelah menyerah, di hadapan wartawan, dia menyampaikan bahwa jika negara memerlukan bantuan, dia siap untuk melayani Republik; dan dia bersama dengan 14 ribu pengikutnya juga siap untuk dilibatkan dalam konfrontasi dengan Malaysia (yang waktu itu didorong oleh Presiden Soekarno). Pernyataan seperti itu tidak mungkin keluar dari seorang separatis, melainkan dari seseorang yang sangat mencintai tanah airnya.²³ Usai ditangkap di Desa Ambutun, Ibnu Hadjar dibawa ke Bandara Landasan Ulin (kini Syamsudin Noor) untuk diterbangkan ke Jakarta.

²² Anis, "Ibnu Hajar: Patriot Tertindas," 63–64.

²³ Ahmad Gaus A. F., *Sang pelintas batas*, 21.

Setibanya di Jakarta, beliau menghadapi sidang Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati pada 23 Maret 1965.

Gambar 3.2 Ibnu Hadjar Diadili



Selanjutnya, Ibnu Hadjar diadili di sebuah pulau dalam Kepulauan Seribu dan diyakini telah dikebumikan di Pulau Onrust, yang terletak di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Gambar 3.3 Makam Ibnu Hadjar



2. Yusliani Noor

Yusliani Noor bin Haji Norhan Muchtar Jaya (Haji Mandor), lahir di Martapura Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di

Kampung Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura, pada 12 Agustus 1965. Menjadi dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 1989.

Pembahasan tentang Ibnu Hadjar tidak bisa dilepaskan dari peran Hasan Basry, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang turut berkontribusi besar dalam perjuangan di Kalimantan.²⁴ Ibnu Hadjar pernah menjabat sebagai komandan pasukan pengawal Panglima ALRI Divisi IV A, Hasan Basry, dalam upaya mempertahankan Kalimantan. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, bahkan dikenal dengan ungkapan: 'di mana ada Hasan Basry, di situ ada Ibnu Hadjar.' Dalam berbagai pertempuran melawan pasukan NICA di wilayah gerilya Kalimantan Selatan, Ibnu Hadjar berperan penting melindungi dan menyelamatkan Hasan Basry. Namun, pascakemerdekaan, jalan hidup keduanya mulai berbeda. Hasan Basry melanjutkan karier militer dan menempuh pendidikan ke Mesir, sementara Ibnu Hadjar tidak diterima di ketentaraan karena tidak menguasai huruf Latin, meski fasih dalam aksara Arab Melayu. Ketika dikirim ke Jawa untuk belajar, sekolah yang dituju ternyata telah ditutup, membuatnya merasa ditelantarkan. Sekembalinya ke Kalimantan melalui Kalimantan Timur, Ia menerima banyak keluhan dari para mantan pejuang yang merasa diabaikan negara. Hal ini memunculkan tekadnya untuk membela mereka, termasuk masyarakat Banjar-Dayak Bukit yang dianggap diperlakukan tidak adil. Dua tokoh republik ini akhirnya menempuh jalan berbeda: Hasan Basry membela kepentingan pemerintah pusat, sedangkan Ibnu

²⁴ *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950; Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah*, 98.

Hadjar memperjuangkan keadilan bagi rakyat yang telah berkorban demi kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

Nama aslinya adalah Haderi. Ia dilahirkan di Kandangan pada bulan April tahun 1920. Diketahui bahwa sejak kecil, ia memiliki karakter yang kokoh dan gemar berkelahi, serta menjadi sosok yang selalu terdepan dalam setiap pertikaian. Di masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan melawan Belanda, Haderi menggunakan nama Ibnu Hadjar. Dengan pangkat Letnan II, ia bertugas sebagai perwira dalam ALRI Divisi IV (A) dan memimpin kelompok gerilya yang beroperasi di sekitar wilayah Kandangan.²⁵

Di desanya, ia dikenal sebagai Tuan Guru. Ia mengajar para murid membaca Alqur'an dan Kitab Parukunan. Sebagai sosok yang dihormati sebagai Tuan Guru, Ibnu Hadjar menginspirasi banyak warga desanya untuk turut berjuang melawan penjajahan NICA pada masa 1945–1949. Namanya mulai dikenal luas seiring kiprahnya dalam pembentukan Pasukan Jibaku di ALRI Divisi IV (A). Pada tahun 1948, ia menjabat sebagai wakil Komandan Pasukan Jibaku di wilayah Hulu Sungai Selatan di bawah pimpinan Ma'rufi. Setelah Ma'rufi dipindah ke urusan teritorial, Ibnu Hadjar menggantikannya sebagai komandan, didampingi Samideri Dumam dan Andi Tajang. Dalam rapat Komando ALRI Divisi IV (A) pada 15 Januari 1949 di Ilung, dibentuk markas dan resimen di wilayah teritorial, di mana Ibnu Hadjar ditunjuk sebagai wakil Resimen Daerah Selatan di bawah pimpinan Mu'alim.²⁶ Dalam rapat di

²⁵ Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.*, 229.

²⁶ Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945–1949).*, 94–95.

Ambarawa yang membahas pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A), hadir sejumlah tokoh penting seperti H. Aberanie Sulaiman, Budhigawis, P. Arya, Gusti Aman, Hasnan Basuki, dan Romansi. Pertemuan yang berlangsung pada 15 Mei 1949 ini dijaga ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar, yang juga dikenal selalu mendampingi Hasan Basry dalam berbagai pertempuran gerilya. Rapat tersebut berhasil menetapkan struktur pemerintahan militer untuk wilayah pertahanan Kalimantan.²⁷

Setelah terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A), Ibnu Hadjar ditunjuk memimpin Resimen dan Pasukan II wilayah tengah serta sebagai pengawal Hasan Basry. Ia berperan menjaga keselamatan Hasan Basry yang menjadi tokoh sentral dalam revolusi fisik di Kalimantan Selatan. Perjuangan ini berakhir saat ALRI Divisi IV (A) dilebur menjadi Divisi Lambung Mangkurat pada 1 November 1949, beralih dari Angkatan Laut ke Angkatan Darat di bawah pimpinan Hasan Basry.

Dalam masa konsolidasi yang berlangsung dari 2 September hingga 10 November 1949, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, di antaranya adalah:²⁸ Selama konsolidasi, terdapat beberapa kendala, yaitu: pejuang di hutan belum tahu gencatan senjata; keraguan menghadapi mantan musuh;

²⁷ Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945–1949)*, 98.

²⁸ Kodam X/Lambung Mangkurat, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Menegakkan Kemerdekaan RI 1945-1949*, 215.

keinginan kembali ke kehidupan biasa; satuan di Kotabaru dan Pulau Laut belum mendapat kabar; serta kendala kesehatan dan keluarga.

Ibnu Hadjar terdorong memperjuangkan keadilan dari pemerintah pusat karena empat hal. Pertama, perlakuan tidak adil dalam proses demobilisasi bekas pejuang gerilya di Kalimantan, yang perjuangannya diabaikan dan dianggap remeh. Kedua, sikap pemerintah dan militer terhadap masyarakat pedesaan, di mana dari 16.000 gerilyawan yang bergabung, hanya 6.000 tersisa setelah pemeriksaan kesehatan dan pendidikan pada Maret 1950. Hal ini dipicu oleh tunjangan rendah sebesar Rp. 3 per hari, pesangon kecil Rp50, dan ketidakakuan sebagai veteran. Akibatnya, banyak anggota pasukan membelot, termasuk di Martapura, Rantau, Kandangan, dan Banjarmasin.²⁹ Ketiga, sebagian besar pemimpin militer yang tiba di Kalimantan Selatan berasal dari mantan anggota Tentara KNIL, yang selama revolusi fisik merupakan lawan para gerilyawan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Dalam proses tes kesehatan dan literasi, banyak dari mantan KNIL tersebut yang menjadi penguji sekaligus komandan para pejuang. Keempat, perlakuan terhadap prajurit pejuang yang didemobilisasi di Kalimantan jauh berbeda dibandingkan dengan yang dialami pejuang di Jawa, di mana para pejuang Kalimantan tidak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil.

Menurut M. Idwar Saleh, ALRI Divisi IV dan lembaganya secara sistematis dihancurkan oleh tokoh-tokoh di Banjarmasin, termasuk pemimpin politik dan pendukung ekonomi liberal. Beberapa pejuang daerah bahkan

²⁹ Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.*, 229.

menolak pengakuan ALRI Divisi IV oleh Republik Indonesia, karena bertentangan dengan keputusan pembubaran ALRI Divisi IV di Jawa dan penghapusan jabatan Gubernur Kalimantan. Sebagai awal penghancuran, nama ALRI Divisi IV diubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat.

Proses penghancuran berlanjut melalui pergantian pimpinan, penangkapan atau dakwaan terhadap anggota, pemindahan tugas ke luar Kalimantan Selatan dengan berbagai alasan, tekanan agar anggota mundur secara sukarela atau paksa, penempatan sebagai anggota Corps Cadangan Nasional, saling menjatuhkan antaranggota, serta penghilangan dokumen perjuangan. Istilah 'Dijk' merujuk pada praktik kekuasaan yang berlangsung di Jakarta.³⁰ Ibnu Hadjar memilih jalannya sendiri dengan memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekan seperjuangannya yang merasa tertindas. Ia mendirikan gerakan KRIJT (Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas) dan tak menyangka harus berhadapan dengan Hassan Basry, yang sebelumnya ia dukung saat bersama di ALRI Divisi IV (A). Keduanya akhirnya berpisah. Untuk mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan Ibnu Hadjar, Hassan Basry diangkat sebagai Komandan dan pada 20 September 1950 ditugaskan sebagai Pemimpin Komando Penyelesaian Wilayah Hulu Sungai. Pada bulan berikutnya, Hassan Basry mendapat dukungan militer dan unit Tentara Republik, lalu mengambil tindakan militer terhadap para gerilyawan pendukung Ibnu Hadjar karena situasi yang buntu.

³⁰ Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.*, 222.

Ia mengumumkan penghentian upaya penyelesaian secara damai, sehingga Tentara dan Polisi mulai menindak gerilyawan yang memperjuangkan keadilan. Situasi ini sangat ironis dan menyedihkan karena Komandan harus menghadapi perlawanan dari anggota yang dulu berjuang bersamanya melawan NICA-Belanda. Sementara kelompok gerilyawan menuntut keadilan, Hassan Basry terjebak dalam tanggung jawabnya. Upayanya menyelesaikan konflik dengan kekerasan dinilai gagal, sehingga pada 11 November 1950 Komando tersebut dibubarkan. Pasukan diserahkan kepada Brigade F yang dipimpin Mayor Sitompul. Meski demikian, Hassan Basry tetap memiliki pengaruh kuat di kalangan gerilyawan. Kementerian Pertahanan memberinya beasiswa untuk memisahkannya dari kelompok pejuang di Kalimantan Selatan. Ia berangkat ke Mesir dari Jakarta pada Februari 1951 dan tinggal di sana hingga 1955. Kepergian Hassan Basry menimbulkan ketidakpercayaan yang semakin besar di kalangan gerilyawan terhadap penguasa militer, yang dianggap berusaha melemahkan pengaruh bekas ALRI Divisi IV (A) dengan memecah-belah anggotanya. Kondisi ini diperparah dengan penempatan mantan pejuang pada posisi yang lebih rendah. Menurut Dijk, kebijakan ini memicu munculnya “gerakan Anti-Jawa.”³¹ Gerakan tersebut pernah menjalin hubungan yang tidak begitu jelas dengan Tentara Lawong pimpinan Christian Simbar di wilayah Buntok, yang juga berupaya menjaga kepentingan lokal dari ancaman pihak luar yang dianggap sebagai musuh.³²

³¹ Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.*, 233.

³² *Mengkolonisasi Borneo*, 178.

Ibnu Hadjar memutuskan untuk bergabung dengan Negara Islam pada akhir 1954 setelah Kartosuwiryo menawarkan posisi menteri kepadanya. Ia kemudian diangkat sebagai Panglima TII wilayah Kalimantan dan mengukuhkan dirinya sebagai “Ulil Amri” dari Kerajaan Islam, dengan kantor yang disebut Istana Islam Merdeka atau Istana Agama Islam Agung. Ibnu Hadjar semakin menguatkan posisinya sebagai penguasa di bawah panji Kerajaan Islam, serta memperoleh karisma yang kuat di kalangan gerilyawan dan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga menjadi sosok legendaris.

Penting untuk dicatat bahwa Ibnu Hadjar dan gerakannya tidak pernah mengalami kekalahan atau menyerah karena kekalahan. Pada 1955, setelah Hassan Basry kembali dari Mesir, ia menyebarkan kabar lisan yang merayu Ibnu Hadjar agar menyerah, dengan janji pengampunan dan posisi memimpin pasukan yang berjumlah 14.000 orang untuk berjuang bersama Republik, termasuk melawan Malaysia, serta janji ibadah haji ke Mekkah. Namun, janji tersebut tidak pernah ditepati. Setelah keluar dari persembunyiannya di hutan, Ibnu Hadjar tidak mendapatkan pengampunan dan keadilan, melainkan dikhianati berkali-kali.

Pada awal September 1963, Ibnu Hadjar ditangkap, dibawa ke Jakarta, dan diadili di Pengadilan Militer dengan status pembelot. Ia menjalani persidangan dengan sikap tegap mengenakan seragam Letnan II.³³ Haderi yang lebih dikenal sebagai Ibnu Hadjar adalah sosok pejuang yang ikhlas namun tak gentar menghadapi medan tempur mana pun. Dalam perjuangannya, ia harus

³³ Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.*, 205–54.

menelan pahitnya pengkhianatan dari para elite yang menjanjikan pengakuan dan kehormatan, termasuk janji untuk memberangkatkannya berhaji. Ketika ia keluar dari persembunyiannya di pedalaman, sambutan luar biasa menantinya: puluhan kerbau disembelih, dan rakyat menyambutnya dengan penuh sukacita, bak menyambut raja yang kembali. Di mata para pengikutnya, Ibnu Hadjar adalah pembela keadilan sosok pemimpin yang membela hak mereka.

Namun, peristiwa tragis menyusul. Di balik gegap gempita sambutan itu, pengkhianatan menyelinap dalam diam. Ia dijebak oleh “tangan tak terlihat”—meski ia diyakini tahu siapa dalangnya. Dalam penahanan, ia ditempatkan di ruang bawah tanah, jauh dari sinar matahari. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia hanya ditemani satu anggota keluarga di akhir hayatnya. Tempat peristirahatan terakhirnya pun tak banyak diketahui. Meski demikian, namanya terus hidup dikenang sebagai pahlawan oleh sebagian, dicap pemberontak oleh lainnya. Namun, pemberontakannya bukan karena kebencian terhadap republik, melainkan karena semangat menegakkan keadilan dan membela nasib rekan seperjuangan.

Ibnu Hadjar adalah pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan selama Revolusi Fisik 1945–1949. Setelah kemerdekaan, ia terus memperjuangkan hak-hak bekas gerilyawan yang merasa disisihkan oleh Pemerintah Pusat. Ia menyuarakan aspirasi orang Banjar dan Dayak yang telah berjuang mempertahankan tanah air dari penjajahan. Ia tidak menuntut kekuasaan, hanya penghargaan yang layak untuk mereka yang telah berkorban. Namun,

suara itu tak digubris. Sebaliknya, tekanan datang dari pusat. Ibnu Hadjar dan kelompoknya dicap sebagai ancaman, bukan mitra perjuangan.

Meskipun pada akhirnya harus berseberangan dengan Hassan Basry, sahabat dan sesama pejuang di masa lalu, Ibnu Hadjar tak pernah menyerah. Ia tidak pernah kalah dalam pertempuran; kegagalannya hanya karena dikhianati oleh janji-janji palsu. Bagi dirinya yang dikenal sebagai Tuan Guru, janji menunaikan ibadah haji merupakan impian besar, cita-cita luhur masyarakat Banjar. Sayangnya, janji itu tak pernah ditepati. Ia malah dijatuhi hukuman penjara dan dijauhkan dari rakyatnya.

Ibnu Hadjar adalah pribadi yang berbeda dari kebanyakan. Ia berani melawan ketidakadilan meskipun harus menghadapi risiko besar. Kesetiaannya kepada rakyat, bukan pada kekuasaan, menjadikannya tokoh yang dihormati. Suaranya mungkin telah tenggelam dalam kesepian, tetapi semangat dan namanya terus dikenang. Bagi para pengikutnya, ia tetaplah pahlawan. Seorang pejuang sejati, pemimpin rakyat, raja di tengah hutan, dan putra bangsa Indonesia yang berjuang demi keadilan dan kesejahteraan negerinya.

3. Setia Budhi

Setia Budhi, Ph.D lahir di Marabahan, Barito Kuala 1 Januari 1965. Sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi Sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Meskipun terdapat banyak peneliti sejarah yang memberikan berbagai alasan mengenai "pemberontakan" yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar, hal ini berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap posisi militer yang dimilikinya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dan

intervensi pemerintah pusat, khususnya oleh para perwira yang berasal dari Jawa, Ia membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIT), sebuah gerakan yang merepresentasikan kekecewaan terhadap ketimpangan perlakuan terhadap daerah.³⁴

Cornelis Van Dijk mengungkapkan bahwa kekecewaan Ibnu Hadjar tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasannya terhadap keberadaan perwira militer di Kalimantan Selatan, tetapi juga oleh bentuk intervensi yang berlandaskan pertimbangan etnis. Salah satu sumber utama ketegangan tersebut adalah tidak terpenuhinya tuntutan rasionalisasi terhadap struktur militer lokal di wilayah tersebut.³⁵ Dalam edisi 30 September 1950, *Harian Nusantara* memberitakan bahwa penolakan terhadap dominasi pejabat asal Jawa tidak hanya muncul dari Ibnu Hadjar dan para pendukungnya di wilayah Hulu Sungai, tetapi juga mencerminkan keresahan yang lebih luas. Menanggapi situasi di Kalimantan Barat, Residen setempat menyatakan pada bulan Agustus bahwa ia menolak menghentikan penempatan pegawai negeri dari Jawa, dengan alasan perlunya membangun struktur pemerintahan daerah dan kepolisian yang lebih efektif.

Pertanyaan mengenai apakah pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar semata-mata dipicu oleh ketidakpuasannya terhadap ketimpangan posisi militer tampaknya belum dapat dijawab secara definitif. Hubungan antara perlawanan tersebut dan persoalan militer perlu ditelaah secara lebih adil dan menyeluruh. Jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih luas, fenomena

³⁴ Budhi, *Gerakan Oposisi Orang Banjar*, 49.

³⁵ Dijk, *Darul Islam sebuah pemberontakan*, 233.

perlawanan yang juga terjadi dalam gerakan SM Kartosuwiryo, Daud Beureueh, Abdul Kahar Muzakar, hingga Ibnu Hadjar, setidaknya dapat dipahami melalui tiga perspektif utama: pertama, sebagai konflik ideologi; kedua, sebagai bentuk respons terhadap tekanan pusat terhadap daerah; dan ketiga, sebagai ekspresi trauma serta kekecewaan lokal yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam catatannya, Nazaruddin Sjamsuddin (1990) menyebut bahwa Ibnu Hadjar menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Negara Islam Indonesia (NII) yang dibentuk di Aceh pada Januari 1955, dan mengidentifikasinya sebagai pemimpin gerakan Darul Islam di Kalimantan.³⁶ Konflik ideologi di daerah kerap dipersepsikan sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang kemudian dijawab dengan kebijakan represif berbasis ideologi nasional. Pendekatan ini mencerminkan semangat negara integralistik ala Soepomo yang kurang akomodatif terhadap aspirasi politik lokal, terutama ketika dibingkai dalam narasi 'revolusi yang belum selesai'. Gerakan seperti yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar, SM Kartosuwiryo, Daud Beureueh, dan Abdul Kahar Muzakar, yang membawa gagasan kosmopolitanisme Islam, sering kali diposisikan berseberangan dengan ideologi Pancasila yang nasionalis dan dianggap sekuler.³⁷

Kisah perjuangan Ibnu Hadjar sebagai bagian dari sejarah lokal mencerminkan pandangan masyarakat Banjar yang menunjukkan kesetiaan,

³⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum republik*.

³⁷ Budhi, *Gerakan Oposisi Orang Banjar*, 54.

kesabaran, dan tanggung jawab moral terhadap negara, terutama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini. Komitmen ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti dilaporkan oleh surat kabar Indonesia Merdeka pada 6 Januari 1953, yang menyebut bahwa warga desa dikenai denda antara Rp900 hingga Rp1.000 karena tidak menjalankan salat, mencerminkan tekad kuat mereka dalam menegakkan ajaran agama.

4. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam, IAIN Palangka Raya. Menurut beliau, Ibnu Hadjar, yang lahir dengan nama Haderi di Ambutun, Hulu Sungai Selatan pada April 1920, dikenal sejak kecil sebagai sosok berkarakter kuat dan suka bertarung. Ia mulai menggunakan nama Ibnu Hadjar saat berjuang melawan Belanda, dan kemudian mendirikan kelompok gerilya bernama Kesatuan Rakjat Indonesia yang Tertindas (KRIjT), meskipun lebih dikenal masyarakat sebagai Kesatuan Rakjat yang Tertindas (KRjT).

Menurut catatan sejarah versi Orde Baru, pada tahun 1957 Ibnu Hadjar bersama para pengikutnya bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII), yang berakar dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosuwiryo di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Setelah bergabung, Ibnu Hadjar diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam (APTI) di wilayah Kalimantan.³⁸

³⁸ Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

TNI Angkatan Darat menanggapi gerakan Ibnu Hadjar dengan kombinasi pendekatan diplomatik dan operasi militer. Ia sempat berniat bergabung dengan TNI, namun kemudian kembali melawan NKRI. Perlawanannya berakhir pada 1963, dan ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada 23 Maret 1965.³⁹

Berdasarkan laporan resmi dari pihak militer, usaha untuk menanggulangi Gerakan Ibnu Hadjar berlangsung dengan cukup rumit. Hingga awal tahun 1959, situasi keamanan di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya pulih akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Ibn Hadjar. Maka dari itu, pimpinan militer setempat memperkuat operasi militernya. Dikenal sebagai “Operasi Delima”, kegiatan ini dimulai pada tahun 1959. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan, agar mereka tidak terpengaruh oleh ajakan dan penipuan kelompok pemberontak. Dengan cara ini, kelompok tersebut tidak akan memperoleh sumber daya untuk melanjutkan aksi mereka. Operasi Delima, yang dimulai pada 23 November 1959 dan berlangsung selama 15 hari, dibagi dalam dua sektor: Sektor A dan Sektor B. Di Sektor A dikerahkan Batalyon 604, sejumlah regu Brimob, Perintis, serta personel OPR. Sementara itu, Sektor B melibatkan Batalyon 605, pasukan Brimob dari dua kompi, regu Perintis, dan 837 personel OPR. Operasi ini berhasil menewaskan sejumlah anggota pemberontak serta menangkap beberapa anggota keluarganya.⁴⁰

³⁹ Dengel, *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo*, 133–36.

⁴⁰ Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 97.

Mayor Asli Zukri memimpin wilayah Kalimantan Tenggara (Kota Baru) yang terbagi dalam empat rayon: Pulau Laut, Pagatan, Tanjung Batu, dan Tanah Grogot. Di Sektor B, Batalyon 605 di bawah komando Mayor R. Maryono bertugas di wilayah Hulu Sungai Utara, Tengah, dan Selatan, yang juga terbagi menjadi empat rayon: Murung Pudak, Barabai, Kandangan, dan Rantau. Adapun wilayah Korem Banjar dipimpin oleh Letkol Ma'mun Martawinata, dengan cakupan operasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.⁴¹

Operasi Segi Tiga yang dimulai pada 10 Maret 1960 berhasil menangkap sembilan orang, menewaskan dua belas, serta menyita senjata dan logistik. Kelompok Ibnu Hadjar bertahan lewat bantuan warga pedalaman, namun larangan pemerintah terhadap aktivitas warga di wilayah operasi memutus suplai mereka. Akibatnya, banyak yang menyerah, termasuk tokoh penting Kastam Djaja. Setelah itu, kekuatan Ibnu Hadjar melemah dan ia terus berpindah tempat untuk menghindari penangkapan.⁴²

Tekanan dari Operasi Segi Tiga memaksa kelompok Ibnu Hadjar melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur. Kodam Kalimantan Timur merespons dengan Operasi Riko di Kampung Baru Ujung, didukung oleh partisipasi warga. Terdesak, Ibnu Hadjar mundur ke selatan dan kelompoknya terpecah menjadi unit-unit kecil dengan kondisi logistik yang buruk. Pada Juli 1963, ia menyerah bersama sejumlah pengikut di Hulu Sungai

⁴¹ Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 97–98.

⁴² Anis, "Arifin.(2011). 'Ibnu Hajar; Patriot Tertindas,'" 62–69.

Selatan. Stabilitas pun pulih, dan pada 11 Maret 1965, Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta menjatuhkan hukuman mati kepadanya, menandai berakhirnya pemberontakan KRjT.⁴³

Berbeda dengan sudut pandang militer, C. van Dijk dan Solahudin menyatakan bahwa keterlibatan Ibnu Hadjar dalam gerakan DI/TII dimulai pada akhir 1954. Pada dekade 1950-an, pemberontakan DI/TII yang berawal dari Jawa Barat mulai mendapat dukungan dari berbagai daerah. Abdul Qahhar Muzakkar di Sulawesi Selatan menyatakan bergabung pada 20 Januari 1952, disusul Daud Beureueh di Aceh pada 20 September 1953. Di Kalimantan Selatan, KRjT pimpinan Ibnu Hadjar disebut telah menyatu dengan DI/TII sejak akhir 1954, sebagaimana dicatat oleh kedua peneliti tersebut.⁴⁴ Dalam versi lain, penyerahan Ibnu Hadjar terjadi setelah ia diyakinkan oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya, disertai janji dari TNI untuk memberinya pelatihan militer di Jawa. Namun, janji tersebut tampaknya hanyalah strategi untuk melemahkan perlawanan. Penyerahan dirinya pada Juli 1963 berlangsung dalam sebuah perayaan rakyat, sebelum akhirnya ia dibawa ke Banjarmasin dan diterbangkan ke Jakarta. Alih-alih menjalani pelatihan, Ibnu Hadjar justru diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mati. Hingga kini, pelaksanaan eksekusi dan lokasi pemakamannya masih belum diketahui secara pasti, menyisakan ruang bagi berbagai spekulasi. Bagi negara, ia dicap

⁴³ Iqbal, *Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 98.

⁴⁴ Solahudin, *NII sampai JI*, 69.

pemberontak.⁴⁵ Namun, bagi sebagian masyarakat, khususnya kalangan akar rumput, Ibnu Hadjar dipandang sebagai pejuang yang memperjuangkan aspirasi rakyat kecil..⁴⁶

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: benarkah KRjT merupakan bagian dari Gerakan Politik NII di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo? Bertentangan dengan pandangan resmi pemerintah dan pendapat C. van Dijk, Nazaruddin Sjamsuddin justru menilai bahwa gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan kerap dikaitkan dengan Darul Islam, meskipun pada kenyataannya memiliki sedikit keterkaitan dengan ketiga gerakan utama lainnya. Oleh sebab itu, menurutnya, gerakan di Kalimantan Selatan tidak termasuk dalam struktur resmi Darul Islam Indonesia..⁴⁷

Meskipun Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRjT) memiliki keterkaitan erat dengan gerakan Darul Islam, baik bukti tertulis maupun lisan menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak sepenuhnya linier. Menganggap KRjT hanya sebagai bagian dari perjuangan NII adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Di Kalimantan Selatan, gagasan pembentukan negara Islam justru lebih dahulu diinisiasi oleh pasukan Darul Islam, bukan oleh Ibnu Hadjar dan kelompoknya. Pemberontakan Ibnu Hadjar sendiri muncul dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam memperlakukan eks pejuang ALRI Divisi IV setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Para pejuang hanya menerima kompensasi seadanya

⁴⁵ Dijk, *VAN DIJK REBELLION UNDER BANNE*, 268.

⁴⁶ Hobsbawm, *On History from Below*, 201.

⁴⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum republik*, 245.

dan dipulangkan ke masyarakat, sementara sejumlah eks aparat kolonial kembali diangkat sebagai pejabat Republik. Jabatan penting di daerah diisi oleh orang-orang dari pusat; Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta dan digantikan oleh Kolonel Sukanda Bratamenggala dari Jawa Barat, dan Gubernur Pangeran Muhammad Noor digantikan oleh Dr. Murjani yang juga berasal dari Jawa. Kecewa dengan realitas itu, masyarakat Kalimantan Selatan melontarkan sindiran tajam: 'Setelah dijajah Belanda, kini dijajah oleh Jawa.'⁴⁸ Meskipun KRjT bersekutu dengan Darul Islam, gerakan ini lebih mencerminkan perlawanan akar rumput yang cenderung bersifat sekuler terhadap dominasi pemerintah pusat. Beragam sebutan yang disematkan kepada kelompok ini mulai dari 'Kesatuan Rakjat Indonesia jang Tertindas', 'Kesatuan Rakjat Islam jang Tertindas', hingga 'Gerombolan Ibnu Hadjar' dan 'Pasukan Islam' menggambarkan kompleksitas dalam memahami identitas serta motivasi KRjT. Untuk menelaah dinamika gerakan ini secara objektif, diperlukan pemahaman mendalam terhadap latar belakang sosial dan budaya yang melingkupi kemunculannya, alih-alih semata-mata terjebak dalam dikotomi antara pemberontak dan pahlawan. Dalam hal ini, pemberontakan KRjT dapat dipandang sebagai wujud nyata dari sebuah gerakan sosial yang tumbuh dari kegelisahan rakyat terhadap ketidakadilan.

Penggunaan istilah 'gerakan sosial' dipilih karena dinilai lebih netral serta mampu mencerminkan dinamika perubahan yang dialami oleh kelompok ini.

⁴⁸ Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 8–9.

Istilah tersebut menggambarkan posisi mereka sebagai aktor sosial yang melawan negara, namun tidak sepenuhnya berpijak pada fondasi ideologis politik yang tegas. Sebaliknya, gerakan ini lebih didorong oleh faktor-faktor kultural dan respons terhadap situasi politik yang berkembang.⁴⁹

Gerakan sosial ini muncul sebagai bentuk protes atas pengalaman ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh pelakunya. Ketidakpuasan mereka bukan karena kesadaran global, melainkan akibat perubahan sosial dan budaya yang mengguncang posisi kelompok lokal. Dalam konteks ini, teori deprivasi relatif menjadi pendekatan yang tepat untuk menjelaskan perlawanan tersebut.⁵⁰ Dalam situasi seperti ini, banyak individu dan kelompok dari masyarakat terjajah merasakan kesenjangan antara harapan mereka terhadap pencapaian status dan kesejahteraan dengan kondisi nyata yang mereka alami serta keterbatasan dalam mewujudkannya. Pemahaman mengenai ketidaksesuaian antara harapan dan kemampuan ini menyebabkan munculnya perasaan kekurangan secara relatif dan kolektif.⁵¹ Kelompok dan individu membandingkan status serta kemampuan mereka dengan orang lain atau masa lalu, sementara perubahan kerap menimbulkan ketimpangan antara harapan dan kenyataan.

Pemberontakan Kesatuan Rakjat yang Tertindas (KRjT), dipimpin oleh Ibnu Hadjar, merupakan bentuk gerakan sosial yang lahir dari kekecewaan mendalam terhadap perlakuan pemerintah pusat terhadap mantan pejuang lokal

⁴⁹ Haralambos dan Holborn, *Sociology*, 562–75.

⁵⁰ Sayles, "Relative Deprivation and Collective Protest," 449–65.

⁵¹ Joan Neff Gurney dan Tierney, "Relative Deprivation and Social Movements," 33–47.

di Kalimantan Selatan pada awal 1950-an. KRjT muncul sebagai wadah bagi para eks-gerilyawan yang merasa dikhianati dan diabaikan oleh negara, terutama akibat kebijakan demobilisasi dan rasionalisasi militer. Dalam pandangan mereka, pemerintah telah melakukan “pengkhianatan sejarah” dengan meminggirkan perjuangan rakyat daerah demi kepentingan birokrasi pusat. Pegunungan Meratus dijadikan basis pertahanan, dan gerakan ini segera menyebar luas usai berakhirnya perang gerilya pimpinan Hassan Basry. Rasa kecewa dan ketimpangan antara harapan akan status serta kesejahteraan, dengan kenyataan pahit yang mereka hadapi, menimbulkan perasaan deprivasi relatif. Ketegangan ini kemudian melahirkan aksi kolektif berupa pemberontakan, yang dimaknai para anggotanya sebagai upaya memperjuangkan kembali hak dan harga diri yang dirampas.

5. C. Van Dijk

C. Van Dijk adalah seorang penulis yang karyanya dikenal dalam bidang kajian Islam dan Indonesia, terutama mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Menurut van Dijk, Ibnu Hadjar meresmikan pembentukan organisasi gerilya barunya dengan nama Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRjT), sebagai wujud perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh para mantan pejuang di Kalimantan Selatan.⁵² Nama tersebut merefleksikan perasaan para mantan pejuang yang merasa dikhianati. Mereka dituding sebagai biang kerusuhan di Kalimantan oleh pemerintah Republik,

⁵² Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 242.

padahal justru mereka menilai pemerintah telah mengabaikan dan menindas mereka. Dua faktor utama yang memicu perasaan ini adalah buruknya proses demobilisasi bekas gerilyawan di Kalimantan serta perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat dan Angkatan Darat terhadap masyarakat pedesaan di wilayah tersebut.

Menurut data resmi dari Sukanda Bratamenggala, hingga bulan Februari ketika kerusuhan antara mantan gerilyawan di Kalimantan dimulai, sekitar 16.000 mantan gerilyawan telah bergabung dengan Angkatan Darat.⁵³ Pada periode selanjutnya, mereka menjalani pelatihan sembari menunggu pemeriksaan medis dan tes lainnya untuk memastikan kelayakan mereka bergabung dengan Angkatan Darat Republik. Sukanda Bratamenggala mencatat bahwa banyak dari mereka segera keluar dari Angkatan Darat, dan pada bulan Maret hanya tersisa sekitar 6.000 orang. Salah satu alasan utama untuk pembelotan masif ini adalah tunjangan harian yang sangat rendah sebesar Rp. 3,-. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukanda Bratamenggala, seorang penyadap karet bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Mereka yang tetap berada di Angkatan Darat Republik yang akhirnya didemobilisasi merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan kolega mereka yang berada di Jawa.

Di Kalimantan, kelompok ini hanya diberikan uang saku minim sebesar Rp. 50,- saat demobilisasi.⁵⁴ Untuk membenarkan tindakan kikir mereka,

⁵³ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 243.

⁵⁴ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 243.

pemerintah berpendapat bahwa para gerilyawan harus puas dengan hadiah spiritual atas pengorbanan mereka untuk negara, pengorbanan yang dipercaya tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Sebagai tambahan penyingkiran atas perasaan terluka, individu yang didemobilisasi ini, berbeda dari mereka yang didemobilisasi di Jawa, bahkan tidak diakui sebagai veteran dan akibatnya tidak berhak atas pensiun. Beberapa di antara mereka yang meninggalkan Angkatan Darat Republik secara sukarela dan yang didemobilisasi secara paksa bergabung dengan pasukan Ibnu Hadjar di hutan. Berlawanan dengan pernyataan mereka pada bulan Januari, pihak berwenang kini terpaksa menerima kenyataan bahwa ada masalah serius yang terjadi. Di Kalimantan Selatan, seperti halnya di beberapa wilayah lain di Indonesia, sejumlah mantan gerilyawan yang kecewa dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sipil mulai melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban. Di daerah seperti Martapura, Banjarmasin, Rantau, dan Kandangan, tercatat adanya pembelotan dari anggota Angkatan Darat dan Kepolisian yang bergabung dengan kelompok gerilyawan, lengkap dengan senjata mereka, sehingga memperkuat kekuatan militer gerakan pemberontak.

Untuk menangani situasi ini, tanggung jawab diberikan kepada tokoh yang dianggap paling berpengalaman, yaitu Hasan Basry, mantan komandan gerilya. Pada 20 September 1950, ia ditunjuk memimpin Komando Penyelesaian Hulu Sungai. Sebulan kemudian, wilayah tersebut ditempatkan di bawah status Bantuan Militer, dan pasukan Republik mulai bergerak kembali guna menegakkan stabilitas. Hasan Basry awalnya menempuh pendekatan damai,

dengan mengeluarkan perintah agar seluruh gerilyawan yang belum menyerah melakukannya sebelum 10 Oktober, serta menjalin komunikasi dengan para pemimpin gerilya untuk menggali aspirasi mereka.⁵⁵ Ibnu Hadjar termasuk salah satu yang merespons seruan Hasan Basry, namun setelah diberi izin kembali ke hutan untuk membujuk pengikutnya, ia tak pernah kembali. Para pemberontak menuntut pergantian sejumlah pejabat sipil, militer, dan kepolisian, karena merasa posisi penting terlalu banyak diisi oleh orang luar, terutama dari Jawa dan mantan kolaborator Belanda. Karena tuntutan itu ditolak, terjadi kebuntuan. Ketika aksi bersenjata terus meluas ke wilayah Barabai, Birayang, Paringin, Kelua, hingga Kandangan, Hasan Basry yang semula empati akhirnya memutuskan tindakan militer. Pada 16 Oktober, Komando menyatakan upaya damai gagal dan operasi pembersihan dimulai.⁵⁶ Secara bersamaan, larangan berkumpul di Hulu Sungai Utara diterapkan dari pukul 02.00 hingga 05.00, sedangkan di Hulu Sungai Selatan, yang dianggap dalam kondisi sangat berisiko, diterapkan dari pukul 20.00 hingga 05.00. Hingga saat ini (yaitu antara 10 dan 15 Oktober), hanya sekitar 670 pejuang gerilya, yang membawa kira-kira 50 senjata api, yang telah melapor kepada pihak berwenang. Mengacu pada pernyataan Sukanda Bratamenggala, yang membagikan data ini, 13 gerilyawan menyatakan minat untuk bergabung dengan Pegawai Negeri Sipil, 30 dengan Kepolisian Angkatan Darat, dan 130

⁵⁵ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 244.

⁵⁶ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 244.

dengan Angkatan Darat. Dari 130 pejuang yang terakhir, hanya 10 yang berhasil memenuhi syarat (10-12-1950).

Ibnu Hadjar merespons aksi pembersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan memperkuat aktivitasnya sendiri. Dalam sepuluh hari setelah dimulainya operasi oleh Angkatan Darat dan Polisi, para pemberontak melancarkan serangan ke kota Kandangan sebanyak tiga kali (N 2-11-1950). Meskipun sempat diberlakukan, Bantuan Militer untuk wilayah Hulu Sungai hanya berlangsung singkat dan dihentikan pada awal November 1950. Pembubaran Komando Solusi Hulu Sungai pun menyusul pada 11 November, karena pendekatan militer Hassan Basry dianggap tidak sesuai. Pemerintah lebih memilih pendekatan damai dan menyerahkan penanganan keamanan kepada Komando Pertahanan Utara. Tak lama kemudian, Hassan Basry mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Mayor H. T. Sitompul. Beberapa hari sebelum pengumuman resmi amnesti nasional pada November 1950 yang tidak mencakup Kalimantan dan Sulawesi Selatan pemerintah menetapkan masa penyerahan diri di Kalimantan dari 5 Desember hingga 15 Januari 1951. Para pemberontak yang menyerah lebih awal akan diseleksi, dan jika bersih dari pelanggaran hukum, diberi opsi untuk masuk ke militer, pemerintahan, atau kembali ke kehidupan sipil. Namun, hasilnya mengecewakan. Meski sempat tersiar kabar bahwa Ibnu Hadjar akan menyerah, hal itu tidak terwujud. Zafry Zamzam, Ketua DPRD Hulu Sungai, sempat bertemu dengan Ibnu untuk menyampaikan tawaran pemerintah, tetapi gagal membujuknya. Ibnu tetap pada sikap semula: menuntut pergantian

pejabat tertentu dan meminta waktu untuk berkonsultasi dengan para pengikutnya.

Seperti bulan Oktober, pemerintah menolak untuk memenuhi tuntutan Ibnu Hadjar, dan setelah 18 Januari 1951, tindakan terhadap dirinya dan para pemberontaknya dilanjutkan. Hanya sejumlah kecil gerilyawan yang menyerah di Kandangan hanya ada delapan orang, dan tidak ada yang membawa senjata. Di luar Kandangan, sekitar 1.063 gerilyawan menyerah, namun hanya sekitar tiga puluh senjata yang diserahkan. Sebagian besar berasal dari kelompok yang menamakan diri Perkumpulan Banteng Borneo. Kandangan kemudian ditetapkan sebagai zona militer, dan pertempuran besar pertama terjadi pada 26 Februari 1951. Di tengah ketegangan, Hassan Basry, yang masih berpengaruh di kalangan gerilyawan, diberangkatkan ke Mesir untuk studi, karena dianggap berisiko secara politik dan keamanan. Namun, pendidikannya di sana tidak berhasil. Kepergiannya dan keterlambatannya kembali ke Kalimantan hingga akhir 1955 menimbulkan kecurigaan bahwa militer sengaja melemahkan pengaruh bekas Divisi IV ALRI. Situasi ini memperkuat keyakinan Ibnu Hadjar bahwa mantan pejuang diabaikan, sehingga memicu kampanye anti-Jawa yang kemudian dibantah oleh pihak berwenang sebagai gerakan spontan yang digerakkan oleh segelintir tokoh.

Penataan administrasi sipil dan militer di Kalimantan terus menjadi sumber konflik yang intens antara Kesatuan Rakyat Indonesia Tertindas atau KRIT dan Republik. Penunjukan pejabat dari Jawa untuk menggantikan pegawai negeri sipil lokal tetap menjadi isu sensitif yang memicu kebencian

dan kekacauan. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap urusan regional dan struktur Pemerintah Daerah dikritik tidak hanya oleh para pendukung sistem federal, tetapi juga oleh individu-individu seperti mantan pejuang Divisi IV ALRI, yang sejak awal mendukung ide Republik yang kesatuan. Isu ini sudah muncul sebelum adanya pengakuan resmi kemerdekaan, ketika Divisi IV ALRI dan penerusnya, Divisi Lambung Mangkurat, harus mematuhi instruksi dan komando dari perwira Republik yang berasal dari Jawa. Situasi ini semakin memburuk setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibubarkannya Daerah Otonom Banjar dan Kalimantan Tenggara, di mana perubahan yang diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan tidak pernah terjadi.

Jauh dari perubahan yang terjadi, komando Angkatan Darat dan Teritori Kalimantan masih tetap dipimpin oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala, seorang yang berasal dari Sunda. Pada bulan November 1951, Jabatan Hassan Basry digantikan oleh Kolonel Sadikin yang berasal dari Jawa Barat. Harapan Basry untuk memperoleh peran kepemimpinan tidak pernah terwujud. Bahkan pada November 1950, ia digeser dari posisinya sebagai Panglima Kalimantan Selatan dan digantikan oleh Mayor Sitompul, seorang perwira asal Batak. Tak lama kemudian, Sitompul juga digantikan oleh Letnan Kolonel Suadi Suromihardjo dari Jawa Tengah, yang memiliki rekam jejak dalam penanganan pemberontakan saat operasi militer di wilayah Merapi-Merbabu. Di sisi lain, administrasi sipil dijalankan oleh Gubernur Dr. Murdjani, juga berasal dari Jawa. Perubahan signifikan yang terjadi di tingkat

local, terutama penggantian para pejabat daerah dengan orang-orang dari Jawa atau mereka yang dianggap setia kepada pusat, menyulut rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat setempat. Sebagian besar dari perubahan ini, bersama dengan masuknya orang-orang dari Jawa, tampaknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan. Karena penolakan yang berkelanjutan dari Pemerintah, atau lebih tepatnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengubah kebijakan di bidang ini, kritik di Kalimantan terhadap apa yang umumnya disebut sebagai "impor pejabat dari Jawa" semakin meningkat. Penggantian pejabat dalam Pemerintahan Sipil, militer, dan kepolisian hanyalah satu bagian dari serangkaian tuntutan yang diajukan oleh Ibnu Hadjar saat Pemerintah berupaya mendekati gerilyawan dan menawarkan mereka kesempatan untuk menyerah.

Selama bertahun-tahun, tuntutan tersebut terus didengungkan oleh KRIJT. Maka, pada awal tahun 1953, KRIJT merekomendasikan agar Pemerintah Pusat mengangkat Mohammad Noor, gubernur Kalimantan pertama dari Partai Republik, untuk menggantikan Murdjani. Pada waktu yang sama, mereka juga mendesak pengangkatan Hassan Basry sebagai Panglima Angkatan Darat dan Teritori Kalimantan, serta Zafry Zamzam, mantan anggota Dewan Banjar dari Kandangan, yang pernah ditangkap oleh Belanda secara singkat pada tahun 1949, untuk menjadi kepala Pemerintahan Sipil Kalimantan Selatan. Ia memperingatkan bahwa Indonesia tidak akan mencapai keamanan selagi "individu Belanda berpura-pura sebagai orang Indonesia" tetap menduduki posisi-posisi penting dalam Pemerintahan.

Dua faktor utama yang turut memicu rasa frustrasi tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia adalah: pertama, proses integrasi pejuang gerilya ke dalam Angkatan Bersenjata Republik yang disertai dengan demobilisasi sejumlah di antaranya; dan kedua, ketidakjelasan mengenai makna serta implementasi dari kemerdekaan yang telah diperoleh.. Perasaan ketidakadilan ini mendorong para mantan pejuang yang sudah demobilisasi untuk bersembunyi di hutan. Setibanya di lokasi tersebut, mereka berharap dapat menuntut pengakuan sebagai tentara tetap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pejuang gerilya yang berada di Kalimantan mungkin mendapat motivasi untuk terus berjuang di tahun-tahun awal setelah pengkhianatan mereka, terinspirasi oleh kesuksesan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dalam mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat serta simpati luas yang diterima oleh gerakannya. Para pemimpin KRIJT terus memberikan harapan kepada anggota mereka hingga tahun 1953 bahwa suatu saat mereka akan diakui kembali sebagai tentara Republik, serupa dengan masa perjuangan kemerdekaan.

Masalah yang kedua, sebagaimana telah disebutkan, adalah perasaan yang dimiliki oleh banyak individu, termasuk di dalam Angkatan Bersenjata Republik, bahwa kemerdekaan sejati belum tercapai. Pada awalnya, terutama karena struktur negara federal yang dipaksakan oleh Belanda dan penolakan Pemerintah Belanda untuk menyerahkan Belanda Barat kepada Indonesia, serta dalam beberapa kasus keberadaan ekonomi Belanda yang masih bertahan, menimbulkan perasaan marah yang mendalam. Selain itu, masyarakat merasa

bahwa penyerahan kedaulatan secara resmi adalah merupakan sebuah anugerah dari Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah, pertama-tama pemerintah federal dan kemudian pemerintah Republik kesatuan, dipandang telah mengkhianati cita-cita awal revolusi Indonesia. Akibatnya, kelompok-kelompok mantan pejuang gerilya dan tentara yang telah demobilisasi di berbagai daerah Indonesia mulai menentang Pemerintah Republik dan Angkatan Bersenjata atas nama revolusi. Dengan menyebut diri sebagai "pembela" atau "pengusung" "17 Agustus 1945" serta Pancasila, atau istilah sejenis, mereka menyatakan ingin melakukan perubahan sosial dan politik.

Ibnu Hadjar adalah seorang individu yang mengklaim mendukung Pancasila. Hingga tahun 1954, ia mengajukan permohonan bantuan finansial demi meraih "kebebasan secara utuh" (PR 16-12-1953). Secara umum, "para pendukung 17 Agustus 1945" tidak menyatakan dengan jelas tujuan mereka. Mereka tentu mendambakan perubahan dalam Pemerintah Republik atau wakil-wakilnya di wilayah-wilayah terpencil, tetapi esensi perubahan sosial dan ekonomi yang mereka bayangkan masih tidak jelas. Sebagian dari mereka menyusun pengertian kebebasan sebagai penghilangan segala bentuk campur tangan pemerintah dalam arti yang paling luas.

Menurut pandangan mereka, kemerdekaan mengindikasikan masa yang cemerlang, terlepas dari kemiskinan dan pajak, serta tekanan dari pemerintah. Sejumlah anggota KRIJT juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran ini, atau setidaknya memanfaatkan gagasan tersebut untuk menarik dukungan masyarakat. Dalam surat KRIJT tahun 1952 yang berasal dari "hutan

Kalimantan" dan ditandatangani oleh dua pemimpin setempat, yaitu Rasjaidi (Rasyaidi) dan Mardjajana (Marjayana), Pemerintah Republik dituduh lebih buruk dibandingkan pemerintah kolonial. Dengan mengesampingkan kenyataan bahwa masyarakat diwajibkan untuk membayar iuran kepada KRIjT sebagaimana yang diungkapkan dalam surat tersebut, para penulis mengecam Pemerintah Republik karena terus mengumpulkan pajak. Oleh karena itu, KRIjT memperkuat usaha mereka untuk mencapai cita-cita masyarakat yang benar-benar sejalan dengan Pancasila (KB 2-12-1953). Selanjutnya, dalam surat yang lain, tujuan KRIjT dijabarkan sebagai penyempurnaan kebebasan negara, rakyat, dan agama (IB 15-9-1953).

Setelah kegagalan Hassan Basry dalam meredakan pemberontakan, Angkatan Darat meluncurkan Operasi Pembebasan yang dipimpin oleh penggantinya, Mayor Sitompul, di awal tahun 1951. Meskipun di satu sisi meningkatkan keamanan publik dengan menurunkan angka perampokan dan pembunuhan warga sipil lokal, di sisi lain, operasi militer ini menimbulkan rasa ketidakpuasan yang telah ada sebelumnya. Angkatan Darat Republik juga tidak menunjukkan sikap lunak terhadap warga sipil, bersikap agresif dan bahkan membunuh mereka demi mengejar musuh.

Dampak dari upaya perdamaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat Republik di Kalimantan tidak mudah untuk ditelaah secara tegas. Kelompok pro-regionalis menilai bahwa langkah tersebut justru membuka ruang bagi mantan anggota KNIL dan kaum federalis untuk melakukan pembalasan terhadap Divisi IV ALRI serta merebut kembali posisi ekonomi yang sempat

hilang pada periode 1945 hingga 1950. Ada dugaan bahwa dalam pelaksanaan operasi Angkatan Darat, puluhan desa dibakar dan ribuan jiwa melayang, dan pada satu titik, sekitar setengah juta orang menjadi pengungsi di Banjarmasin. Kemungkinan tujuan dari kampanye Tentara Republik tidak hanya terbatas pada aspek militer dan politik. Gerakan gerilya cukup efektif, mencapai salah satu sasaran utama perang gerilya: menguasai area pedesaan dan mengisolasi musuh di area perkotaan.

Divisi IV ALRI juga telah mendirikan Pemerintahan Militer yang menurut P. Arya berpegang pada prinsip demokrasi, menghargai seluruh agama, dan bertekad untuk menghapuskan kelas borjuasi kapitalis serta mengatasi kolonialisme, korupsi, dan berbagai kejahatan lainnya. Selain itu, Divisi IV ALRI, melalui pembentukan koperasi pedesaan dan pengaturan akses masuk ke kota, berhasil mencegah atau setidaknya mengurangi aliran penjualan produk-produk dari desa ke kota, sehingga mengganggu jaringan perdagangan perkotaan yang terhubung hingga ke desa-desa. Dalam suasana ini, nama Ibnu Hadjar dan kelompok Persatuan Rakyat Indonesia Tertindas mulai muncul ke permukaan. Jika dibandingkan dengan pemberontakan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, gerakan ini terbilang berskala kecil, dengan jumlah pengikut yang pada awalnya hanya berjumlah beberapa ratus orang, gerakan ini mengalami pertumbuhan pada tahun-tahun pertama, namun tetap di kategori kecil. Tidak pernah ada kelompok dalam gerakan ini yang berisi lebih dari seratus orang, sementara di daerah lain di Indonesia, ada banyak kelompok beranggotakan tiga hingga enam ratus orang, terutama di fase awal.

Sebagian besar unit KRIjT di berbagai wilayah bergerak secara independen, biasanya terdiri atas lima hingga lima puluh gerilyawan. Mereka menghadapi keterbatasan senjata dan terus berada dalam tekanan dari pasukan Republik serta aparat Kepolisian. Ketika Ibnu Hadjar mulai aktif di hutan, diperkirakan bahwa para pemberontak memiliki empat unit senapan Bren, enam senapan Sten, serta beberapa puluh senapan biasa (N 19-10-1950). Perkiraan lebih lanjut menunjukkan total senjata api masing-masing lima puluh (IB 27-2-1954) dan 148 (IB 26-11-1953) untuk periode awal, yang masih terbilang rendah. Sisa anggota pasukan di bawah Ibnu Hadjar dilengkapi dengan alat-alat seperti pisau, pedang, tombak, dan sejenisnya. Karena kelompok KRIjT sangat terbatas dalam alat tempur dan memiliki jumlah yang sedikit, kampanye yang dilakukan oleh Tentara Republik awalnya menunjukkan keberhasilan. Sebagian besar senjata pemberontak KRIjT berhasil disita, membuat keberlanjutan gerakan ini semakin sulit. Tentara Republik menerapkan strategi pengepungan di wilayah pegunungan untuk memutus jalur logistik gerilyawan. Akses makanan dibatasi ketat warga hanya diizinkan membawa bekal untuk satu hari yang menyebabkan banyak gerilyawan menyerah akibat kelaparan. Sebagian lainnya ditangkap oleh warga demi imbalan uang, hingga muncul perebutan klaim atas tawanan. Permintaan untuk mempersenjatai warga ditolak, dengan alasan pemberontak dapat ditangani tanpa senjata api, seperti halnya melawan Belanda dengan bambu runcing di masa lalu. Menjelang akhir 1951, pemerintah yakin bahwa gerakan KRIjT telah terkurung di Hulu Sungai. Wilayah Kalimantan lainnya

dinyatakan aman dan pengawasan diserahkan kepada polisi serta aparat sipil. Namun, karena situasi di Hulu Sungai dianggap genting, status darurat militer diberlakukan di seluruh daerah tersebut sejak 1 November 1951. Sementara itu, Kotabaru meski relatif tenang, tetap diawasi ketat karena menjadi titik masuk bantuan untuk Ibnu Hadjar dari Kahar Muzakkar.

KRIJT tetap mempertahankan komitmennya terhadap upaya perdamaian, dan pasca pencabutan status darurat militer (SDM) pada Juli 1952, kelompok ini perlahan mulai memulihkan kekuatannya dari tekanan militer sebelumnya. Ini sebagian disebabkan oleh kesalahan penilaian dari pihak berwenang. Saat pembubaran SOB, mereka beranggapan, mengingat masih berlangsungnya aksi gerilya, bahwa Angkatan Bersenjata Republik seharusnya tetap memberikan dukungan militer. Namun, enam bulan setelahnya, mereka membatalkan keputusan tersebut. Dampak dari tindakan KRIJT selama dua setengah tahun hingga saat itu cukup signifikan, meskipun tampaknya tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Menurut data resmi, sekitar 1.656 bangunan telah dibakar atau dijarah, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp. 6 miliar, sementara sekitar 1.055 individu telah mengalami penculikan, dibunuhan, atau luka-luka. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 35.000 jiwa (IM 21-2-1953).

Setelah penghentian bantuan militer, pemerintah sipil yang memegang tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan mulai melaksanakan tugasnya dengan semangat tinggi. Gubernur Kalimantan, Dr. Murdjani, segera menginisiasi kembali serangkaian pertemuan bersama pejabat pemerintahan,

aparatus kepolisian, tokoh agama, perwakilan partai politik, serta pemimpin masyarakat di Kalimantan Selatan. Dalam diskusi tersebut, ia berusaha meyakinkan para pemimpin keagamaan untuk mengeluarkan instruksi kepada pengikutnya guna melawan KRIJT, dan menyatakan bahwa ia sedang menyusun strategi pertempuran melawan para pemberontak. Mengacu pada masalah komunikasi dan pemahaman yang kurang antara Angkatan Bersenjata Republik, Kepolisian, dan Administrasi Sipil dalam operasi sebelumnya, Murdjani menegaskan bahwa dia sendiri akan mengawasi semua operasi yang akan datang. Ia akhirnya mengungkapkan rencananya, setelah sehari-hari bernegosiasi, pada tanggal 24 Februari 1953.

Meskipun terdapat laporan bahwa fokus akan dialihkan ke resolusi damai setelah penarikan militer, strategi Murdjani yang disebut Konsep Kzata (Rencana Kita) sangat berorientasi pada pendekatan militer. Komando tertinggi untuk aksi yang direncanakan akan dikelola olehnya bersama Kapolda, Sulaiman. Markas khusus akan dibangun di Kandangan di bawah pengawasan bupati Hulu Sungai Selatan, Sjarkawi (Syarkawi), serta komisaris polisi Nafiah dan Tjokrodiningrat (Cokrodiningrat). Jumlah pasukan Brigade Mobil Polri yang akan diperbanyak akan ditempatkan di lokasi-lokasi paling penting di sekitar Rantau, Kandangan, dan Barabai. Seruan kepada Pemerintah agar memberikan amnesti kepada para pemberontak, sebagaimana diperjuangkan oleh pemimpin sosial di Banjar serta cabang Persatuan Indonesia Raya (PIR) Kalimantan, diabaikan. Murdjani berkeyakinan bahwa individu yang telah melakukan tindakan kriminal tidak seharusnya diampuni

begitu saja, meskipun ia masih mengklaim percaya pada penyelesaian damai, dengan menegaskan bahwa "pintu untuk menyerah masih terbuka". Jika para pemberontak yang menyerah meminta ampunan dari Tuhan dan benar-benar menyesali tindakan jahat mereka, Pemerintah Daerah Kalimantan, menurut janji Murdjani, akan mediasi dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan keringanan bagi mereka. Namun, setelah sebulan berlalu, Murdjani mulai yakin bahwa pendekatan persuasif tidak efektif dan bahwa langkah militer merupakan satu-satunya solusi yang tersisa.

Kepolisian yang ada sekarang ternyata masih terlalu kecil untuk menjalankan tugas mereka dalam menghadapi KRIjT. Selain itu, kepolisian memegang tanggung jawab penuh dalam menjaga hukum dan ketertiban ketika, pada awal tahun 1953, beberapa wilayah yang sebelumnya relatif aman, seperti Riam Kanan dan Martapura, kembali mengalami kerusuhan (IM 6-1-1953). Para anggota KRIjT dan kepolisian mereka kembali muncul dari hutan untuk menarik pajak dan menerapkan denda. Dari Riam Kanan, terdapat laporan mengenai individu yang dipaksa untuk membayar pajak sebesar Rp. 5 per bulan (IB 22-12-1953).

Petugas pajak yang dikenal sebagai mandur pasar atau mandor pajak juga melakukan kunjungan ke desa-desa untuk memungut pajak penjualan (IB 24-12-1953). Di beberapa wilayah, mereka sudah beroperasi cukup lama sementara aktivitas pemberontak KRIjT semakin meningkat. Ibnu Hadjar sendiri aktif bergerak di antara Kandangan dan Barabai, dengan markas yang didirikannya di Gunung Hantu, sebuah gunung di desa Datar Laga dekat

Kandangan. Lokasi ini sangat strategis karena hanya dapat diakses dari satu arah melalui ladang tinggi sepanjang tiga kilometer yang mudah diawasi (IB 20-7-1954). Dari markas tersebut, Ibnu Hadjar mengatur pergerakan pasukannya di wilayah Hulu Sungai dan sering memimpin serangan, termasuk ke Kabupaten Kotabaru.

Di utara, di sekitar Tanjung, terdapat kelompok pimpinan Kartoio (Asmuni) yang aktif sejak awal 1950-an. Markasnya di Tanjung menjadi basis serangan ke Hulu Sungai dan pergerakan ke selatan sampai Alabio. Pada Januari 1953, Kartoio ditangkap dalam operasi gabungan antara Angkatan Darat dan warga lokal. Di Sungai Balangan, Utuh Tjilik memimpin KRIT, sementara di dekat Batumandi, Kurdi (dikenal juga sebagai Subrata dan Dahlan) aktif hingga Dahlan dibunuh oleh penduduk setempat pada awal 1954. Kepala dan tangan Dahlan dipenggal dan diserahkan kepada pihak berwenang. Komandan lain yang berperan di masa awal termasuk Daeng Matelo di Sungai Amandit, Rasjaidi dan Mardjajana di Rantau, Tamberani di Sei Pinang, serta Chairul Muis yang pada 1954 digantikan oleh A.K. Muni setelah wafatnya.

Gusti Surjah, yang tergabung dalam kelompok tersebut, tewas ditembak saat mencoba melarikan diri pada Agustus 1954 di Banjar. Sementara itu, Mawardi dan wakilnya, Raden Mochtar Djaja, beroperasi di wilayah antara Martapura dan Pleihari. Tamberani dieksekusi pada akhir 1953 dan posisinya digantikan oleh Ipul, yang kemudian dibunuh oleh seorang letnan bernama Ibnu Hadjar, Djumberi Oumberi, karena tuduhan melakukan tindakan teror terhadap warga. Mawardi meninggal pada tahun 1954, tetapi tetap dikenang di

kalangan penduduk sebagai hantu; contohnya, seorang penduduk desa menggambarkan sosok hantu besar dengan taring panjang yang muncul dari mulutnya, memperkenalkan dirinya dengan suara berat sebagai Mawardi. Berkaitan dengan hal ini, ada banyak kepercayaan mistis lain yang muncul seputar para pemberontak yang tewas. Misalnya, saat penguburan Masri, tanah di makam terus terisi karena sisi-sisinya ambruk. Pada usaha kedua untuk menggali makam tersebut, lubang hampir tertutup sepenuhnya. Dengan kerjasama yang melibatkan beberapa orang yang menggali sementara yang lainnya mendorong ke dalam liang, akhirnya jenazah dapat tertanam, walaupun lubang masih berisiko runtuh. Insiden menakutkan ini dianggap sebagai pertanda bahwa tanah pun menolak menerima Masri akibat tindakan kejam yang dilakukannya semasa hidup.

Pertumbuhan aktivitas pemberontakan pada tahun 1953 kemungkinan ditunjukkan oleh KRIyT sebagai bukti bahwa kelompok ini masih ada. Para pemberontak terdorong untuk bergerak bukan hanya karena ditariknya dukungan militer, yang bisa diartikan sebagai tanda bahwa para pemimpin menganggap masalah keamanan di Kalimantan Selatan sudah tidak lagi prioritas, tetapi juga oleh dua faktor tambahan lainnya. Pertama, ada konflik internal, dan kedua, kunjungan Sukarno yang tidak berjalan baik ke Kalimantan. Akibat seruan baru dari penguasa untuk para gerilyawan menyerah, dan karena situasi sulit yang dihadapi unit-unit KRIyT akibat tindakan militer Republik, timbul perpecahan di antara para gerilyawan. Salah satu kelompok, setelah terlibat dalam serangkaian pertempuran yang tidak

menguntungkan selama lebih dari dua tahun, mendukung penyerahan termasuk seorang pemimpin pemberontak, Haji Machfudz Sidik (Makhfudz Sidik). Ia, di awal pemberontakan, merupakan salah satu asisten yang paling dapat diandalkan oleh Ibnu Hadjar dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Ibnu Hadjar. Pada Desember 1950, selama negosiasi antara Zafry Zamzam dan Ibnu Hadjar, justru Haji Machfudz Sidik, bukan Ibnu Hadjar, yang memerintahkan prajurit KRIjT untuk tidak menyerah. Namun, dua tahun kemudian, setelah kehilangan pengaruh di KRIjT, Haji Machfudz berubah menjadi pendukung utama penyerahan diri. Akibatnya, pada 16 Februari 1953, ia ditembak oleh salah satu pengikut Ibnu Hadjar saat sedang mandi, atas perintah Ibnu Hadjar. Posisi Haji Machfudz kemudian digantikan oleh Dardiansjah (Dardiansyah), adik Ibnu Hadjar, yang sebagai wakil komandan KRIjT kadang memimpin pasukan di Hulu Sungai saat Ibnu Hadjar pergi ke Kotabaru.

Kunjungan Presiden Soekarno ke Kalimantan pada akhir Januari 1953 bertujuan meninjau wilayah rawan di Indonesia. Dalam kunjungannya, Soekarno mendatangi Banjarmasin, Negara, Barabai, Kandangan, Martapura, dan Amuntai. Fokus utama perjalanan ini adalah membahas posisi Islam dalam masyarakat serta perdebatan tentang perlunya Indonesia menjadi negara Islam. Saat perjalanan dari Martapura ke Kandangan, Soekarno melihat langsung dampak pemberontakan KRIjT, termasuk sisa truk militer yang dibakar oleh pemberontak tepat sebelum kedatangannya. Soekarno berulang kali menyerukan agar perdamaian dan persatuan ditegakkan kembali. Di

Kandungan, ia menegaskan bahwa “pembunuhan, pembakaran, dan gangguan ketertiban jelas bertentangan dengan prinsip Islam,” dan menambahkan, “kecuali kita dihancurkan oleh orang-orang kita sendiri, Indonesia akan tetap hidup.” Namun, pernyataan Soekarno mengenai peran Islam dan penyebaran Marhaenisme menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan komunitas Islam Kalimantan Selatan, yang menampakkan penolakan saat Soekarno tiba di Hulu Sungai. Allah SWT berfirman pada Q.S an-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Puncak ketegangan terjadi di Amuntai ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang memicu reaksi keras dari kalangan umat Islam, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Pidato tersebut disampaikan secara spontan sebagai tanggapan atas seruan massa yang meneriakkan pertanyaan seperti: “Tolong jelaskan, apakah Anda mendukung negara nasional atau negara Islam?” dan “Bung Karno, apa sebenarnya Marhaenisme itu?”. Bagian yang paling kontroversial dalam pidato itu adalah ketika Soekarno menanggapi isu negara Islam—sebuah topik sensitif yang sejak 1945 telah menjadi pusat perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Ia berpendapat bahwa jika Indonesia menjadi negara Islam, wilayah-wilayah dengan mayoritas non-Muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan sebagian Sulawesi, kemungkinan besar akan

memilih untuk memisahkan diri. Ia juga menyebut bahwa Irian Barat bisa jadi enggan bergabung dengan Indonesia.

Pandangan ini sebenarnya sejalan dengan argumen Mohammad Hatta pada Agustus 1945, yang bertujuan meraih dukungan kelompok Islam terhadap pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pernyataan Soekarno tetap menimbulkan kegaduhan politik, terutama karena disampaikan dalam suasana emosional dan di hadapan publik yang sensitif terhadap isu keagamaan.

Pada awalnya, pidato Soekarno yang disampaikan di wilayah terpencil tidak menimbulkan kehebohan. Namun, setelah isi pidato itu menyebar luas, berbagai pihak mulai mengecam. Ia dikritik karena dianggap mengabaikan perbedaan antara kelompok yang memperjuangkan Negara Islam secara damai dan yang menempuh jalur kekerasan. Soekarno juga dituduh berseberangan dengan semangat dakwah Islam serta terlalu condong pada pandangan sekuler.

Reaksi keras datang dari Cabang Masyumi Kalimantan Selatan yang menilai pidato itu sebagai bentuk propaganda yang tidak memberi ruang bagi aspirasi partai-partai Islam. Kecaman serupa muncul di Aceh, Jakarta, dan daerah lain. Di Jakarta, protes disampaikan oleh tokoh Masyumi M. Isa Anshary dan organisasi-organisasi Islam seperti NU dan GPII. Bahkan Ketua HMI, Dakhlan Ranuwihardjo, mengirim surat permintaan klarifikasi langsung kepada Soekarno.

Sebagai tanggapan, Soekarno menjelaskan dalam kuliah di Universitas Indonesia pada 7 Mei 1953. Ia menegaskan bahwa sebagai Presiden, ia wajib menjaga konstitusi dan menyatakan Indonesia sebagai negara nasional. Namun

ia menekankan bahwa pernyataannya tidak bermaksud membatasi kebebasan umat Islam untuk menyampaikan aspirasi politik mereka.

Pernyataan Soekamo yang diungkapkan di Amuntai dan Jakarta menyoroti bahwa Pancasila adalah kesepakatan yang harus diakui untuk mencegah konflik, serupa dengan pandangannya di tahun 1945. Namun, ada elemen baru dalam argumennya yang, meskipun tidak disadari saat itu, mungkin mencerminkan kekhawatiran tersembunyi dari para politisi sekuler pada waktu itu. Pada tahun 1952, persiapan untuk pemilihan umum dimulai, tidak hanya untuk Anggota Parlemen, tetapi juga untuk Badan Konstituante yang bertugas merancang konstitusi baru. Ada kekhawatiran yang meluas bahwa partai-partai Islam bisa menjadi pemenang, yang pada akhirnya bisa memenuhi aspirasi Muslim menuju pembentukan Negara Islam. Feith mencatat: "Di kalangan anggota partai non-Islam, terdapat rasa ketakutan yang meluas bahwa pemilu akan mengakhiri negara berdasarkan Pancasila dan digantikan dengan Negara Islam."

Soekamo mungkin juga memiliki kecurigaan terhadap kemungkinan tersebut. Di tahun 1945, ia telah mendorong umat Muslim untuk mencari suara mayoritas dalam lembaga perwakilan jika mereka ingin membangun masyarakat Indonesia berlandaskan Islam. Namun kini, ia menekankan bahwa suara mayoritas bukanlah segalanya: Indonesia bukanlah "mayorokrasi". Ia menegaskan kepada audiensnya, yang umumnya dapat digambarkan sebagai Muslim yang taat, bahwa ia "tidak pernah menemukan kata 'demokrasi' dalam istilah Islam... hanya 'musyawarah'... tidak pernah menemukan istilah 'pemilu'

dalam kosakata Islam". Dalam pandangannya, demokrasi tidak sama dengan pemilu, melainkan dengan musyawarah. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa, daripada sekadar melakukan pemungutan suara tentang berbagai isu, Islam menginginkan musyawarah untuk "mencapai tujuan bersama kita semua... demi kepuasan semua pihak".

Di Kalimantan, aksi KRIjT menunjukkan peningkatan kekerasan. Serangan besar pertama terjadi saat kunjungan Presiden Soekarno, ketika sekitar lima puluh rumah di sebuah desa dibakar oleh unit KRIjT, memanfaatkan momen ketika warga keluar menyambut kedatangan Presiden. Malam berikutnya, rumah-rumah yang tersisa juga dibakar oleh Tentara Republik, diduga sebagai balasan atas simpati penduduk terhadap gerilyawan. Beberapa minggu kemudian, lebih dari enam puluh rumah dan satu masjid di desa dekat Telaga Langsung turut dibakar oleh kelompok pemberontak.

Pada Maret, diperkirakan sekitar tiga ratus gerilyawan jumlah yang belum pernah dicapai sebelumnya terlihat di dekat Martapura. Mereka melancarkan serangan terhadap pos-pos Polisi yang terpencil dan terlibat dalam baku tembak, yang memungkinkan mereka memperoleh kembali sejumlah senjata. Kekuatan yang meningkat ini mendorong mereka keluar dari daerah pegunungan untuk menyerang kota-kota kecil yang minim atau bahkan tanpa penjagaan.

Pada September, seratus gerilyawan menyerang pos-pos Polisi di Pengaron dan Karang Intan. Rantau dan Pengaron diserbu secara bersamaan, diikuti dengan serangan ke Negara pada November. Bahkan Kotabaru sempat

dikuasai sementara oleh KRIjT. Puncaknya terjadi pada malam 12 Desember 1953, ketika Kandangan diserang dari empat arah sekaligus. Berdasarkan gaya komando yang terdengar saat serangan, diperkirakan operasi ini dipimpin langsung oleh Ibnu Hadjar..

Di Banjarmasin, masyarakat mulai merasakan kekhawatiran. Selama bulan Juli dan Agustus, Gubernur Murdjani telah menginisiasi serangkaian diskusi dengan wakil partai politik untuk membicarakan infiltrasi gerilyawan ke dalam kota tersebut. Ia mengungkapkan bahwa keadaan semakin memburuk setelah tentara KRIjT menerobos blokade di Hulusungai dan memasuki tidak hanya Banjarmasin tetapi juga wilayah Banjar dan Kotabaru. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan. Wakil mereka menuntut tidak hanya tindakan tegas terhadap KRIjT, tetapi juga disiplin internal di antara aparaturnya atas apa yang disebut sebagai "perampokan dari belakang meja" (PR 18-8-1953).

Di samping itu, ada desas-desus bahwa Ibnu Hadjar berencana menyerang Banjarmasin pada tanggal 17 dan 18 Agustus, bersamaan dengan demonstrasi besar untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang dijadwalkan. Namun, serangan itu tidak pernah terwujud. Menjelang akhir tahun, berita dari kantor berita nasional Antara mengabarkan bahwa Ibnu Hadjar berencana untuk menyerang Banjarmasin, Rantau, dan Kandangan secara bersamaan pada hari tahun baru, namun Brigade Mobil berhasil menggagalkan rencana tersebut (IB 29-12-1953). Meskipun serangan terhadap Banjarmasin tidak terlaksana, kota

tersebut tetap menjadi sasaran aksi sabotase. Pada awal Desember, satuan KRIJT yang kabarnya seluruh anggotanya perempuan membakar gudang rotan milik perusahaan besar Belanda, Internatio. Di lokasi kebakaran, mereka meninggalkan sebuah pesan dari Komando Pertahanan KRIJT Banjarmasin yang bertuliskan: "Ini adalah balasan dari Persatuan Rakyat Tertindas" (IB 5-12-1953, 6-12-1953).

Pada waktu yang sama, KRIJT berusaha memperluas pengaruhnya terhadap masyarakat dengan menunjuk kepala desa baru, mengikuti tradisi Divisi IV ALRI. Fokus dari usaha ini adalah pada wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaannya saat awal pembentukannya di tahun 1950 dan awal tahun 1951. Kepala Kepolisian Kalimantan Selatan, Komisaris Kampono, menyampaikan bahwa KRIJT cukup berhasil dalam menjalankan aksinya. Meningkatnya intensitas kegiatan kelompok tersebut mendorong permintaan agar Angkatan Darat kembali memberikan dukungan, sementara Brigade Mobil turut diperkuat dengan kedatangan satu kompi tambahan dari Jawa Timur. Rencana pembentukan korps sukarelawan juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Meski demikian, wacana ini disambut dengan kehati-hatian, karena muncul kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat dimanfaatkan oleh mantan gerilyawan untuk menuntut status sebagai anggota resmi Tentara Republik.

Sementara itu, masyarakat sipil terus mendesak agar diselenggarakan amnesti umum. Pada akhir tahun 1953, cabang PNI Amandit menuntut agar Presiden Soekarno secara terbuka meminta Ibnu Hadjar untuk menghentikan

perlawanan yang dilakukannya. Semua individu yang menyerah harus diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata atau lembaga-lembaga Pemerintah lainnya. Selanjutnya, cabang Amandit meminta agar Burhanuddin, mantan negosiator Divisi IV ALRI, menggantikan Murdjani sebagai gubernur (IB 8-1-1954). Cabang ini mengemukakan pendapat yang juga didukung oleh pihak lain bahwa Presiden Soekarno seharusnya meminta hal yang sama kepada Ibnu Hadjar seperti yang telah dilakukannya kepada Kahar Muzakkar saat kunjungan ke Sulawesi Selatan di tahun 1953. Sebenarnya, Presiden Soekarno memerlukan waktu lama untuk melaksanakan hal tersebut. Setelah kunjungan ke Banjarmasin akhir 1955, ia menyerukan agar Ibnu Hadjar menghentikan perlawanan. Namun, ajakan itu tidak diindahkan dan aktivitas KRIJT tetap tinggi. Tahun berikutnya, dukungan militer kembali dikerahkan, dan Hassan Basry dipanggil untuk memimpin operasi, dengan harapan pengaruhnya dapat mengakhiri pemberontakan. Hassan Basry pun merasa optimis akan keberhasilan tugas yang diberikan, yang dijadwalkan berlangsung selama setahun. Operasi ini dijadwalkan dimulai dari bulan Mei hingga akhir tahun.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh Hassan Basry untuk meredam pemberontakan adalah menggalang pendekatan persuasif melalui kampanye lisan dari rumah ke rumah. Kampanye ini bertujuan meyakinkan para pemberontak bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan sesuai hukum apabila memilih untuk menyerah. Selain pendekatan personal tersebut, ia juga memanfaatkan media massa seperti siaran radio dan pamflet untuk

menyebarkan imbauan agar para gerilyawan menghentikan perlawanan. Guna memperkuat tekanan moral, dua tokoh daerah lainnya Firmansjah, mantan Kepala Staf Pesindo Kalimantan, dan Idham Chalid, tokoh terkemuka dari Nahdlatul Ulama diundang ke Kalimantan Selatan. Idham Chalid khususnya berperan dalam menggandeng para pemimpin agama untuk mendukung pemerintah. Para ulama pun menanggapi dengan mengeluarkan seruan agar para pemberontak menyerah (PR 7-5-1956, 18-5-1956, 14-6-1956).

Respon terhadap upaya ini cukup besar; dalam waktu satu bulan, sekitar 400 pemberontak menyerahkan diri, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Raden Mochtar Djaja (PR 14-5-1956). Menyusul kemudian, pada bulan Agustus, Dardiansjah (adik dari Ibnu Hadjar) dan Tjinaby, yang menjabat sebagai Kepala Staf dan Jaksa Agung KRIT, juga menyerah. Keduanya diterbangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal A.H. Nasution, dalam rangka membahas penyelesaian konflik secara menyeluruh. Bahkan sebelum keberangkatan, Dardiansjah telah menyatakan dukungannya terhadap upaya damai melalui siaran radio di Banjarmasin (PR 3-8-1956, 6-8-1956, 28-8-1956). Pada titik ini, situasi pemberontakan tampak mereda. Ibnu Hadjar mulai kehilangan pengaruh karena banyak pendukung setianya telah meninggalkan barisan, dan muncul kabar bahwa ia pun sedang mempertimbangkan untuk menyerah. Hassan Basry bahkan sempat bertolak ke Pegatan, Kotabaru, untuk melakukan negosiasi langsung dengannya (PR 14-9-1956).

Namun, niat tersebut tidak pernah terwujud. Ibnu Hadjar tetap melanjutkan perjuangannya selama tujuh tahun berikutnya. Ia juga memanfaatkan meningkatnya semangat kedaerahan di luar Jawa pada akhir 1950-an. Meskipun tidak sampai memicu pemberontakan besar seperti di Sumatera atau Sulawesi, di Kalimantan tetap muncul inisiatif lokal berupa pembentukan Dewan Lambung Mangkurat, yang dipimpin oleh seorang komandan daerah. Akibatnya, militer di Kalimantan Selatan lebih fokus pada ketegangan dengan Pemerintah Pusat daripada menangani gerakan Darul Islam, yang memberikan ruang bagi Ibnu Hadjar untuk memperkuat kembali posisinya.

Akhir dari gerakan ini terjadi pada Juli 1963, ketika Ibnu Hadjar dan para pengikutnya secara resmi menyerah dalam sebuah upacara di desa Ambutun, Hulusungai Selatan. Keesokan harinya, ia hadir dalam rapat umum di Banjarmasin terkait Konfrontasi Malaysia, dan menyatakan kesiapannya untuk mengabdikan kepada negara, bahkan menawarkan partisipasi dirinya dan "14.000 tentaranya" dalam konfrontasi tersebut. Ia juga mengungkapkan harapan untuk mendapatkan pengampunan, dan disebut-sebut akan diberangkatkan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, pada awal September, ia justru ditangkap. Pada Maret 1965, Ibnu Hadjar diadili oleh Pengadilan Militer Khusus dan dijatuhi hukuman mati. Saat persidangan, ia tampil mengenakan seragam Angkatan Darat berpangkat Letnan Dua..

6. Anhar Gonggong

Prof. Dr. Anhar Gonggong selaku Dosen Pembimbing Bidang Studi Sejarah pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Jurusan Sejarah

Universitas Negeri Jakarta. Anhar Gonggong berargumen bahwa gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar mempertanyakan alasan mengapa setelah mencapai kemerdekaan, fokus hanya pada pulau Jawa dan tidak pada upaya memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ia juga membandingkan tindakan Kahar Muzakkar dengan gerakan Ibnu Hadjar, yang memiliki latar belakang penyebab yang serupa. “Awal mula gerakan Kahar Muzakkar bukanlah gerakan DI/TII, melainkan bertujuan untuk menghidupkan Pancasila melalui pembentukan Resimen Hasanuddin. Demikian juga dengan Ibnu Hadjar, dia berjuang untuk rakyat yang merasa tertekan, meskipun ada elemen Islam, namun ia tidak menonjolkan bahwa dirinya merupakan bagian dari gerakan Darul Islam, lebih kepada suara rakyat yang tertindas. Perasaan tertekan yang dialami Ibnu Hadjar muncul karena tidak ada perubahan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, ini memang dapat melemahkan persatuan bangsa, tetapi jika diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak ada yang memiliki niat demikian, ini semua bermula dari rasa kecewa.”⁵⁷

7. H. Adjim Arijadi

Adjim Arijadi, seorang budayawan dan seniman senior Kalimantan Selatan, merupakan salah satu tokoh lokal yang secara terbuka menyuarakan penghargaan terhadap Ibnu Hadjar sebagai seorang pejuang kemerdekaan, bukan sekadar sosok yang diberi label “pemberontak”. H. Adjim Arijadi wafat pada 1 Januari 2016. Dalam berbagai kesempatan, termasuk forum diskusi dan

⁵⁷ *Penguatan dan pelemahan persatuan bangsa*, 78.

dialog budaya sejarah di Banjarmasin, Adjim Arijadi menegaskan bahwa perlawanan Ibnu Hadjar harus dipahami dalam konteks sosial dan politik pasca-kemerdekaan yang penuh ketegangan dan kekecewaan terhadap pusat kekuasaan. Menurutnya, meskipun dalam narasi resmi negara Ibnu Hadjar digolongkan sebagai bagian dari gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yakni melalui organisasi Angkatan Perang Tentara Islam (APTI) namun banyak masyarakat Kalimantan Selatan justru melihat Ibnu Hadjar sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak rakyat Banjar, yang kala itu merasa tersisihkan oleh struktur kekuasaan Jakarta pasca-pembubaran Divisi IV ALRI Kalimantan.

Adjim menyoroti bahwa Ibnu Hadjar bukan sekadar tokoh militer, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pusat terhadap daerah. Ia menyuarakan bahwa Ibnu Hadjar bersama pasukannya bergerak karena menuntut kejelasan nasib, pengakuan jasa perjuangan, dan hak atas kedaulatan lokal yang tidak mereka dapatkan setelah proklamasi. Perlawanan Ibnu Hadjar, menurut Adjim, mencerminkan aspirasi politik dan identitas lokal yang terpinggirkan, dan karena itu tidak adil jika hanya dinilai dari kaca mata hukum positif sebagai makar atau pemberontakan

H. Adjim Arijadi juga termasuk di antara para tokoh yang mendukung upaya rehabilitasi nama baik Ibnu Hadjar agar diakui secara resmi sebagai bagian dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia mendorong pendekatan yang lebih objektif dan inklusif dalam menilai sejarah, serta menuntut rekonstruksi narasi sejarah yang tidak hanya didominasi oleh versi tunggal dari negara. Bagi

Adjim, sejarah harus ditulis dengan kejujuran intelektual dan keadilan terhadap suara daerah. Dalam konteks ini, ia menyuarakan bahwa perjuangan Ibnu Hadjar perlu dilihat dari sisi sosiologis, antropologis, dan kultural, bukan semata dari sudut pandang politik negara yang hegemonik.

8. Asvi Warman Adam

Asvi Warman Adam mantan peneliti dari BRIN berpendapat bahwa tindakan militer Ibnu Hadjar masih dianggap sebagai bentuk pemberontakan meskipun ia pernah berjuang sebelumnya melawan penjajahan atau merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah terkait angkatan bersenjata.⁵⁸ Asvi Warman Adam berpendapat bahwa manuver ketentaraan Ibnu Hadjar tetap dianggap sebagai tindakan pemberontakan, meskipun latar belakangnya mencakup kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat setelah perjuangan kemerdekaan. Hal ini ditegaskan meski Ibnu Hadjar pernah berjasa dalam melawan penjajah dan berjuang untuk Republik. Menurut Asvi, gerakan Ibnu Hadjar seharusnya juga dipahami dari konteks lokal, yakni konflik antara kepentingan pusat dan daerah termasuk ketidakpuasan akibat penataan ulang militer yang tidak mengakomodasi pejuang daerah (misalnya karena buta huruf aksara Latin dan tidak dipromosikan).² Gerakan tersebut muncul bukan karena ambisi ideologis seperti mendirikan negara Islam, melainkan sebagai respons atas rasa ketidakadilan sosial dan politik yang dirasakan.

⁵⁸ *Penguatan dan pelemahan persatuan bangsa*, 78.

Asvi Warman Adam menyatakan bahwa meskipun Ibnu Hadjar pernah berperang melawan penjajah, manuver militernya setelah itu tetap berupa pemberontakan terhadap pemerintah pusat, karena ketidakpuasan atas kebijakan militer dan administrasi negara termasuk penataan ulang TNI dan perlakuan terhadap pejuang lama yang tidak memenuhi standar birokrasi pusat.

Asvi menyoroti pentingnya memahami gerakan Ibnu Hadjar dari perspektif lokal, bukan hanya sudut pandang pusat, karena ada konflik struktural antara kepentingan pemerintah pusat dan hak serta penghargaan yang diharapkan oleh masyarakat dan pejuang daerah dari Kalimantan Selatan.

No	Nama Tokoh	Latar Belakang	Pandangan terhadap Ibnu Hadjar	Jenis Gerakan	Motif Utama	Relasi dengan Negara	Status Historis
1	Yusri Darmadi	Sejarawan Lokal Kalsel	Menyebut Ibnu Hadjar sebagai pejuang yang kecewa karena dimarginalkan oleh pusat	Lokal–Sosial	Kekecewaan terhadap restrukturisasi militer	Dipinggirkan, lalu melawan	Perlu rehabilitasi sejarah
2	Yusliani Noor	Akademisi ULM Banjarmasin	Menyoroti peran Ibnu Hadjar dalam perjuangan kemerdekaan dan perlakuan tidak adil pasca-kemerdekaan	Milisi pejuang → oposisi	Ketidakadilan sosial	Awalnya pro-republik, lalu oposisi	Perlu dilihat kontekstual
3	Setia Budhi	Sosiolog, ULM	Melihat Ibnu Hadjar sebagai bagian dari dinamika hubungan pusat-daerah yang rumit	Perlawanan lokal	Frustrasi dan kesenjangan struktural	Perlawanan terhadap dominasi pusat	Representasi konflik struktural
4	Muhammad Iqbal	Peneliti Sejarah Islam	Menyebut gerakan Ibnu Hadjar bermuatan ideologi Islam pada fase akhir, namun tidak murni	Radikal Islamis (fase akhir)	Agama + kekecewaan sosial	Bergabung dengan DI/TII untuk dukungan	Dwi-muka: pejuang dan pemberontak

5	Van Dijk	Sejarawan Belanda	Mengklasifikasikan Ibnu Hadjar sebagai pemberontak regional dalam kerangka DI/TII	Pemberontakan Islam	Ideologi Islamis dan kekuasaan lokal	Musuh negara	Pemberontak dalam bingkai nasional
6	Anhar Gonggong	Sejarawan Nasional	Menekankan bahwa Ibnu Hadjar bukan pemberontak murni, tapi pejuang kecewa	Perlawanan lokal	Ketidakadilan terhadap pejuang	Diabaikan oleh negara	Harus dilihat dari sisi perjuangan
7	H. Adjim Arijadi	Tokoh Agama/Kultural	Menilai Ibnu Hadjar sebagai mujahid yang tidak dihargai jasanya oleh negara	Jihad lokal	Penegakan keadilan dan syariat	Dikhianati setelah berjuang	Layak direhabilitasi sebagai pahlawan
8	Asvi Warman Adam	Sejarawan LIPI/BRIN	Mengkritik narasi resmi: Ibnu Hadjar bukan hanya pemberontak, tetapi korban marginalisasi	Gerakan sosial politik	Reaksi terhadap pengabaian pejuang lokal	Diklasifikasikan sepihak oleh negara	Perlu re-evaluasi sejarah

C. Periode Ibnu Hadjar

Ada 2 periode Ibnu Hadjar dalam pergerakannya, yaitu:

1. Periode Ibnu Hadjar sebagai Pejuang

Ibnu Hadjar, yang lahir dengan nama asli Haderi, berasal dari pedalaman Kalimantan Selatan, tepatnya dari daerah Hulu Sungai. Ia bukan berasal dari kalangan bangsawan atau terpelajar, melainkan rakyat biasa yang memiliki semangat juang tinggi. Keterlibatannya dalam dunia militer tidak diawali oleh latar belakang akademik, melainkan oleh semangat nasionalisme yang kuat serta kedekatannya dengan masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai pemuda berani, tegas, dan mudah bergaul dengan rakyat jelata, yang kemudian menjadi basis kekuatannya saat memimpin perlawanan. Menurut C. Van Dijk: “*Ibnu Hadjar was a charismatic figure whose influence stemmed not from elite status, but from his grassroots connection and experience in guerrilla warfare.*”⁵⁹ Ibnu Hadjar dikenal di antara para pejuang sebagai seorang yang loyal terhadap perjuangan kemerdekaan. Ia bergabung dengan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, unit militer yang dibentuk untuk menahan laju kembalinya Belanda di Kalimantan setelah Proklamasi 1945. Dalam divisi ini, Haderi menunjukkan kepemimpinan yang efektif, walaupun tidak formal secara militer.

Ibnu Hadjar merupakan sosok pejuang kemerdekaan selama periode revolusi fisik di Kalimantan Selatan dari tahun 1945 hingga 1949. Dalam perjuangannya, Ibnu Hadjar menjadi pembela keadilan bagi rekan-rekannya yang mengalami perlakuan semena-mena dari delegasi pusat antara 1950 hingga 1963. Ibnu Hadjar

⁵⁹ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 289.

berupaya mengingatkan Pemerintah Pusat akan perjuangan masyarakat Banjar dan Dayak dalam mempertahankan tanah Banyu Banjar dari kolonisasi NICA-Belanda. Ia tidak menuntut lebih, selain penghargaan yang layak bagi rekan-rekan seperjuangannya. Namun, setiap usulan yang ia ajukan selalu ditolak oleh pemerintah. Alih-alih mencapai kesepakatan, yang didapatkan justru tekanan yang besar dari pusat. Mereka dipandang sebagai kelompok pemberontak yang menolak untuk mengikuti keinginan pusat. Dalam perjuangannya, Ibnu Hadjar bahkan harus berhadapan dengan mantan komandannya sendiri, Hassan Basry. Namun, upaya Hassan Basry untuk menghentikan gerakan yang dipimpin Ibnu Hadjar tidak membuahkan hasil.⁶⁰

Haderi bukan berasal dari kalangan priyayi atau militer formal. Ia merupakan bagian dari rakyat biasa yang menyatu dengan kondisi sosial masyarakat lokal yang kala itu tengah bergejolak akibat penjajahan, revolusi, dan ketimpangan pembangunan. Ketika Revolusi Kemerdekaan Indonesia pecah pada tahun 1945, Ibnu Hadjar menjadi salah satu tokoh muda yang aktif dalam perlawanan terhadap Belanda dan NICA. Ia tidak menempuh pendidikan formal tinggi, tetapi kecerdasan praktis dan kemampuan militernya berkembang secara otodidak melalui pengalaman gerilya dan kedekatan dengan tokoh-tokoh pejuang lokal.

Ibnu Hadjar bergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan, sebuah satuan semi-militer yang dibentuk oleh pejuang lokal untuk mempertahankan Kalimantan dari agresi militer Belanda pasca Proklamasi 1945. Divisi ini tidak berada di bawah struktur formal TNI karena

⁶⁰ Hairiyadi dan Akmal, *Lintasan sejarah maritim Kalimantan Selatan*, 261.

posisinya lebih bersifat gerilya dan lokalitas, namun perannya sangat strategis dalam mempertahankan wilayah Kalimantan dari kekuatan kolonial. Perjuangannya dalam ALRI Divisi IV membuatnya dikenal luas di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan sebagai figur pemuda yang pemberani, religius, dan anti-penjajahan. Ia menjadi simbol lokal perlawanan rakyat. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum berakhir. Di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan, rakyat masih harus berhadapan dengan kembalinya kekuatan kolonial Belanda melalui NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang diboncengi oleh pasukan Sekutu. Meskipun pusat perjuangan kemerdekaan berada di Jawa, semangat perlawanan juga menyala di luar pulau Jawa, salah satunya melalui pembentukan kekuatan militer lokal.

Di Kalimantan Selatan, kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, sebuah divisi tidak resmi dari Angkatan Laut Republik Indonesia yang terdiri dari para pemuda lokal, bekas pejuang gerilya, dan tokoh masyarakat yang memiliki jiwa nasionalis. Salah satu figur yang kemudian menonjol dalam struktur perjuangan ini adalah Ibnu Hadjar, atau Haderi, yang dikenal sebagai pemuda tangguh dan berani. Menurut Van Dijk: “Although his military background was informal, Ibnu Hadjar’s command over guerrilla fighters in South Kalimantan became a key element in resisting Dutch reoccupation.”⁶¹ Ibnu Hadjar aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak masa revolusi fisik (1945–1949).

⁶¹ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 290.

Bersama dengan rekan-rekannya, ia memimpin barisan pemuda dan laskar rakyat di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam barisan militer lokal di bawah nama ALRI Divisi IV. Meskipun status organisasi ini tidak sepenuhnya diakui oleh struktur militer resmi pemerintah pusat, peranannya dalam mempertahankan wilayah Kalimantan sangat signifikan. Menurut sumber lokal Kodam VI/Tanjungpura “ALRI Divisi IV adalah benteng pertahanan rakyat Kalimantan terhadap kembalinya kolonialisme Belanda. Tokoh-tokoh seperti Haderi berperan penting dalam mengorganisasi kekuatan rakyat di daerah pedalaman.”⁶²

Ibnu Hadjar kala itu menjabat sebagai Komandan Kompi, membawahi pasukan rakyat di daerah Hulu Sungai. Ia memiliki kepercayaan luas dari masyarakat karena sikapnya yang egaliter dan kedekatannya dengan ulama serta tokoh adat. Ia juga menunjukkan ketekunan dalam menyusun strategi perlawanan, terutama dengan taktik gerilya di medan hutan Kalimantan.

Ibnu Hadjar (Haderi) dikenal sebagai tokoh lapangan yang berani, memiliki kemampuan militer yang menonjol meskipun tidak mendapatkan pendidikan militer formal. Ia bergabung dalam ALRI Divisi IV sebagai pemuda pejuang dari Hulu Sungai. Keberaniannya dalam berbagai pertempuran serta kemampuannya menggalang dukungan rakyat membuatnya cepat naik ke jajaran kepemimpinan taktis di divisi tersebut. Ia kemudian dipercaya menjadi Komandan Kompi, sebuah jabatan non-formal yang memberi otoritas komando atas satuan kecil dalam struktur gerilya. Wilayah operasinya meliputi hutan-hutan dan desa di sekitar Tapin

⁶² Kodam VI/Tanjungpura, *Sejarah Perjuangan Kalimantan Selatan*, 143.

dan Barabai, di mana ia kerap memimpin serangan terhadap pos Belanda dan sabotase terhadap jalur logistik lawan. Menurut laporan Kodam VI/Tanjungpura “Ibnu Hadjar merupakan salah satu tokoh lapangan paling aktif dalam ALRI Divisi IV, terutama dalam menyusun strategi tempur dan membangun jaringan komunikasi dengan rakyat.”⁶³

Selain dikenal sebagai komandan lapangan, Ibnu Hadjar juga memiliki pengaruh spiritual. Ia menjalin hubungan erat dengan para kiai dan tokoh tarekat di pedalaman. Dalam setiap pergerakan, ia tidak hanya mengusung semangat kemerdekaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, persaudaraan, dan jihad melawan penjajahan. Kedekatannya dengan rakyat menjadikannya sebagai sosok yang dicintai, terutama karena sikapnya yang tidak elitis. Ia hidup bersama pasukannya di hutan, menerima logistik dari rakyat desa, dan selalu memberikan tempat bagi para ulama dalam menyusun strategi sosial dan moral. Ibnu Hadjar, yang sebelumnya dikenal sebagai Haderi, menempati posisi penting sebagai salah satu komandan kompi. Ia memimpin laskar rakyat dalam pertempuran gerilya, khususnya di wilayah Hulu Sungai dan Tapin. Karakternya yang sederhana, dekat dengan masyarakat, serta berani dalam pertempuran menjadikan ia disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Menurut Van Dijk “Ibnu Hadjar was not just a fighter; he was a symbol of regional resistance, whose leadership relied more on grassroots legitimacy than on formal military command.”⁶⁴

⁶³ Kodam VI/Tanjungpura, *Sejarah Perjuangan Kalimantan Selatan*, 154.

⁶⁴ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 290.

Peran Ibnu Hadjar tidak terbatas pada komando militer. Ia juga menjadi tokoh mediasi antara kelompok laskar, ulama lokal, dan rakyat desa yang dilibatkan dalam logistik dan perlindungan pasukan. Kemampuannya membangun jaringan komunikasi yang efisien menjadikannya aktor penting dalam keberlangsungan perlawanan di luar Jawa. Ibnu Hadjar memiliki kedekatan khusus dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga tokoh moral yang dipercaya masyarakat pedalaman. Dalam banyak kesaksian, ia kerap berkonsultasi dengan para ulama sebelum melakukan operasi militer, dan selalu menanamkan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bentuk jihad fi sabilillah. Menurut penjelasan Tim Sejarah Kodam VI/Tanjungpura “Ibnu Hadjar tidak hanya memimpin perlawanan fisik, tetapi juga perlawanan spiritual. Ia dianggap sebagai mujahid oleh masyarakat sekitar, yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan.”⁶⁵ Nilai-nilai keislaman yang ia bawa tidak lepas dari latar belakang Kalimantan Selatan yang dikenal religius. Ini memberikan landasan ideologis bagi rakyat untuk mendukung perjuangannya secara total, bahkan setelah pemerintah pusat tidak lagi mengakomodasi perjuangan mereka.

Ibnu Hadjar (Haderi), berasal dari pedalaman Kalimantan Selatan, muncul sebagai tokoh militer non-formal yang sangat berpengaruh. Ia bergabung dengan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, sebuah satuan semi-militer yang dibentuk secara lokal oleh rakyat Kalimantan untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda. Meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan militer formal, Ibnu Hadjar menunjukkan kepemimpinan lapangan yang luar biasa. Ia dipercaya sebagai

⁶⁵ Kodam VI/Tanjungpura, *Sejarah Perjuangan Kalimantan Selatan*, 155.

komandan kompi, memimpin ratusan pasukan dalam operasi gerilya di daerah Tapin dan Hulu Sungai. Peran Ibnu Hadjar bukan sekadar komando tempur. Ia juga menjadi penghubung antara kelompok bersenjata dengan tokoh agama, tokoh adat, dan rakyat sipil. Hal ini menjadikan dirinya bukan hanya sebagai komandan militer, tetapi juga figur pemersatu dan ideologis.

Secara hukum, keberadaan militer non-formal seperti ALRI Divisi IV tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat itu. Tidak ada dasar hukum yang mengafirmasi atau menetapkan status mereka sebagai bagian sah dari Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait pengakuan, kedudukan, dan hak-hak mereka pasca-kemerdekaan. Padahal dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara wajib memberikan perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketika negara tidak memberikan pengakuan dan kepastian hukum kepada figur militer non-formal seperti Ibnu Hadjar, maka dapat dikatakan bahwa prinsip konstitusionalitas dan keadilan hukum telah terabaikan. Dalam perspektif sosiologi militer, kepemimpinan moral dan ideologis mencakup kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, membentuk kesadaran kolektif, dan memberi arah perjuangan, bahkan dalam keterbatasan struktur formal. Ibnu Hadjar, yang dikenal

sederhana, religius, dan dekat dengan rakyat, memainkan peran ini secara konsisten.

Ibnu Hadjar bukanlah seorang komandan dengan gelar militer formal atau pendidikan tinggi. Namun, masyarakat memandangnya sebagai tokoh yang jujur, tegas, dan siap berkorban, yang mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Islam dan nilai-nilai lokal Dayak dan Banjar. Menurut Van Dijk “Ibnu Hadjar earned his authority not from rank, but from character. *His spiritual disposition, discipline, and proximity to the people made him an unrivalled leader in the eyes of his followers.*”⁶⁶ Keteladanan moral inilah yang menjadi fondasi loyalitas pasukan dan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Bahkan setelah dianggap memberontak oleh pemerintah pusat, banyak warga yang tetap menyembunyikan dan membantu kelompoknya karena percaya bahwa perjuangannya adalah demi keadilan. Dalam negara hukum, kepemimpinan moral dan ideologis yang tumbuh dari aspirasi rakyat bukanlah ancaman, tetapi bagian dari ekspresi demokratis. Pasal 28E UUD 1945 memberi ruang bagi warga untuk menyuarakan pikiran dan keyakinan: Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pemimpin seperti Ibnu Hadjar harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan rakyat dalam merespons kekecewaan terhadap pusat, bukan sekadar ancaman

⁶⁶ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 291.

terhadap negara. Mengabaikan ekspresi ideologis ini justru bisa mendorong radikalisasi, sebagaimana dikritik oleh Franz Magnis-Suseno “Negara yang menutup ruang keadilan dan menstigmatisasi perjuangan moral sebagai kriminal akan memproduksi lebih banyak konflik laten.”⁶⁷ Dalam konteks gerakan sosial dan perjuangan rakyat, kharisma moral dan keteladanan sosial menjadi aspek fundamental dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Tidak semua pemimpin memperoleh wibawa dari jabatan atau struktur formal, melainkan dari pengakuan sosial atas kepribadian, komitmen moral, dan keberpihakan kepada rakyat tertindas. Sosiolog Max Weber mengklasifikasikan jenis kepemimpinan karismatik sebagai bentuk kekuasaan yang lahir dari kemampuan luar biasa seseorang dalam menginspirasi dan membimbing pengikutnya, bukan dari hukum atau tradisi “*Charismatic authority rests on the devotion to the exceptional sanctity, heroism, or exemplary character of an individual person.*”⁶⁸ Dalam sejarah Indonesia, terutama pasca-proklamasi, tokoh-tokoh seperti Ibnu Hadjar memainkan peran penting sebagai pemimpin karismatik yang hadir dari basis moral dan pengalaman perjuangan, bukan dari legalitas struktural.

Dalam hukum pidana modern, kepribadian dan motivasi moral seseorang merupakan bagian dari penilaian terhadap mens rea (niat jahat) dalam suatu tindak pidana. Kepemimpinan seperti yang dimiliki Ibnu Hadjar, yang dibangun atas dasar moralitas perjuangan dan keteladanan sosial, seharusnya tidak serta merta dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap negara (makar). Prof. Andi Hamzah, pakar

⁶⁷ Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 212.

⁶⁸ Weber, *Economy and Society*.

hukum pidana Indonesia, menekankan pentingnya memahami latar belakang sosiologis dalam proses kriminalisasi “Bukan semua perlawanan terhadap negara dapat langsung dikategorikan sebagai makar, terutama jika dilandasi oleh semangat keadilan dan pembelaan terhadap ketimpangan.”⁶⁹

Dengan demikian, penggunaan pasal makar terhadap tokoh seperti Ibnu Hadjar sepatutnya dikaji secara substantif, bukan hanya legalistik. Tindakan seseorang yang memiliki kharisma moral tinggi dan dikenal karena keteladanan sosial, bila tidak dilandasi niat subversif murni, seharusnya dinilai sebagai ekspresi perlawanan politik terhadap ketidakadilan struktural. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak asasi, kebebasan berpendapat, dan perlakuan hukum yang adil kepada setiap warga negara, termasuk mereka yang menyuarakan kritik terhadap negara. Hal ini dijamin oleh: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap...” Dalam konteks ini, kharisma moral dan tindakan-tindakan sosial dari pemimpin seperti Ibnu Hadjar seharusnya dipandang sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, bukan semata-mata ancaman terhadap negara. Negara justru berkewajiban untuk memahami akar ketidakpuasan, bukan menindasnya secara represif.

2. Periode Ibnu Hadjar Melakukan Perlawanan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, pemerintah pusat berupaya untuk menata ulang struktur militer

⁶⁹ Hamzah, *Delik-delik Khusus*, 138.

dan administrasi nasional. Salah satu kebijakan strategis adalah demobilisasi dan integrasi pasukan-pasukan lokal ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, proses ini menimbulkan ketidakpuasan di beberapa daerah, terutama Kalimantan Selatan, tempat di mana Ibnu Hadjar dan ALRI Divisi IV beroperasi secara gerilya melawan Belanda. Ibnu Hadjar merasa bahwa pemerintah pusat telah mengabaikan jasa-jasa mereka sebagai pejuang lokal. Seiring dengan tidak diakomodasinya aspirasi dan status pasukannya, ia kemudian menyatakan sikap perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia, yang pada akhirnya menjadikan dirinya dikategorikan sebagai pemberontak.

Pemberontakan yang dipimpin oleh Letnan Dua Ibnu Hajar muncul sebagai bentuk akumulasi ketidakpuasan dan perasaan terkhiranati oleh otoritas pusat. Melalui organisasi gerilya KRjT, Ibnu Hajar menampung para mantan prajurit yang merasa dirugikan. Ia kemudian memimpin perlawanan di daerah Kandangan. Tindakan perlawanan mereka kepada pemerintah pusat diikat oleh semangat Islam, sebab agama ini sangat berperan dalam menyatukan perasaan masyarakat Banjar. Konsep negara Islam sering kali dibahas di langgar-langgar (mushala) tempat Ibnu Hajar membangkitkan semangat para gerilyawan; kendati dokumen yang menunjukkan adanya gambaran nyata tentang ide negara Islam versi Ibnu Hajar sejatinya tidak pernah ada. Koneksi antara gerakan Ibnu Hajar dengan gerakan DI di Jawa Barat menjadi penting setelah beberapa syarat yang diajukan Ibnu Hajar untuk mencapai perdamaian diabaikan oleh pemerintah pusat.

Akibatnya, gagasan negara Islam yang diperkenalkan oleh pasukan DI dengan mudah bersatu dalam gerakan Ibnu Hajar."⁷⁰

Menganalisis kehidupan Ibnu Hadjar, dapat disimpulkan bahwa dia adalah sosok biasa yang memiliki rasa cinta bangsa yang mendalam, dan siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Dorongan nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan jiwa patriotisme membawanya turut berjuang bersama Hasan Basry melalui wadah perjuangan ALRI Divisi IV. Langkah ini mencerminkan komitmennya dalam memperjuangkan penyatuan Kalimantan Selatan dan wilayah tenggara Kalimantan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Konfrontasi terjadi ketika ia memperjuangkan keadilan terhadap pemerintah pusat akibat proses rasionalisasi dan seleksi administrasi di tubuh militer yang tidak memenuhi harapan para pejuang. Pemerintah Orde Lama memiliki alasan rasionalisasi untuk para pejuang lokal yang kurang memahami huruf Latin. Padahal, mereka sejatinya bisa membaca, meski hanya dalam huruf Arab dan Arab Melayu. Oleh sebab itu, dia mengakomodasi ketidakpuasan para pejuang dalam organisasi Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT). Menurut catatan sejarah versi Orde Baru, pada tahun 1957 Ibnu Hadjar bersama para pengikutnya bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII), yang berakar dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosuwiryo di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Setelah bergabung, Ibnu

⁷⁰ Ahmad Gaus A. F., *Sang pelintas batas*, 20–21.

⁷¹ Irwandi, *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*, 22.

Hadjar diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam (APTI) di wilayah Kalimantan.⁷²

TNI Angkatan Darat menanggapi gerakan Ibnu Hadjar dengan kombinasi pendekatan diplomatik dan operasi militer. Ia sempat berniat bergabung dengan TNI, namun kemudian kembali melawan NKRI. Perlawanannya berakhir pada 1963, dan ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada 23 Maret 1965.⁷³

Berdasarkan laporan resmi dari pihak militer, usaha untuk menanggulangi Gerakan Ibnu Hadjar berlangsung dengan cukup rumit. Hingga awal tahun 1959, situasi keamanan di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya pulih akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Ibn Hadjar. Maka dari itu, pimpinan militer setempat memperkuat operasi militernya. Dikenal sebagai “Operasi Delima”, kegiatan ini dimulai pada tahun 1959. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan, agar mereka tidak terpengaruh oleh ajakan dan penipuan kelompok pemberontak. Dengan cara ini, kelompok tersebut tidak akan memperoleh sumber daya untuk melanjutkan aksi mereka. Operasi Delima, yang dimulai pada 23 November 1959 dan berlangsung selama 15 hari, dibagi dalam dua sektor: Sektor A dan Sektor B. Di Sektor A dikerahkan Batalyon 604, sejumlah regu Brimob, Perintis, serta personel OPR. Sementara itu, Sektor B melibatkan Batalyon 605, pasukan Brimob dari dua kompi, regu Perintis, dan 837 personel OPR. Operasi ini berhasil menewaskan sejumlah anggota pemberontak serta menangkap beberapa anggota keluarganya.⁷⁴

⁷² Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

⁷³ Dengel, *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo*, 133–36.

⁷⁴ Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRJT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 97.

Mayor Asli Zukri memimpin wilayah Kalimantan Tenggara (Kota Baru) yang terbagi dalam empat rayon: Pulau Laut, Pagatan, Tanjung Batu, dan Tanah Grogot. Di Sektor B, Batalyon 605 di bawah komando Mayor R. Maryono bertugas di wilayah Hulu Sungai Utara, Tengah, dan Selatan, yang juga terbagi menjadi empat rayon: Murung Pudak, Barabai, Kandangan, dan Rantau. Adapun wilayah Korem Banjar dipimpin oleh Letkol Ma'mun Martawinata, dengan cakupan operasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.⁷⁵ Operasi Segi Tiga yang dimulai pada 10 Maret 1960 berhasil menangkap sembilan orang, menewaskan dua belas, serta menyita senjata dan logistik. Kelompok Ibnu Hadjar bertahan lewat bantuan warga pedalaman, namun larangan pemerintah terhadap aktivitas warga di wilayah operasi memutus suplai mereka. Akibatnya, banyak yang menyerah, termasuk tokoh penting Kastam Djaja. Setelah itu, kekuatan Ibnu Hadjar melemah dan ia terus berpindah tempat untuk menghindari penangkapan.⁷⁶

Tekanan dari Operasi Segi Tiga memaksa kelompok Ibnu Hadjar melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur. Kodam Kalimantan Timur merespons dengan Operasi Riko di Kampung Baru Ujung, didukung oleh partisipasi warga. Terdesak, Ibnu Hadjar mundur ke selatan dan kelompoknya terpecah menjadi unit-unit kecil dengan kondisi logistik yang buruk. Pada Juli 1963, ia menyerah bersama sejumlah pengikut di Hulu Sungai Selatan. Stabilitas pun pulih, dan pada 11 Maret 1965, Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta

⁷⁵ Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 97–98.

⁷⁶ Anis, "Arifin.(2011). 'Ibnu Hajar; Patriot Tertindas,'" 62–69.

menjatuhkan hukuman mati kepadanya, menandai berakhirnya pemberontakan KRJT.⁷⁷

Berbeda dengan sudut pandang militer, C. van Dijk dan Solahudin menyatakan bahwa keterlibatan Ibnu Hadjar dalam gerakan DI/TII dimulai pada akhir 1954. Pada dekade 1950-an, pemberontakan DI/TII yang berawal dari Jawa Barat mulai mendapat dukungan dari berbagai daerah. Abdul Qahhar Muzakkar di Sulawesi Selatan menyatakan bergabung pada 20 Januari 1952, disusul Daud Beureueh di Aceh pada 20 September 1953. Di Kalimantan Selatan, KRJT pimpinan Ibnu Hadjar disebut telah menyatu dengan DI/TII sejak akhir 1954, sebagaimana dicatat oleh kedua peneliti tersebut.⁷⁸ Dalam versi lain, penyerahan Ibnu Hadjar terjadi setelah ia diyakinkan oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya, disertai janji dari TNI untuk memberinya pelatihan militer di Jawa. Namun, janji tersebut tampaknya hanyalah strategi untuk melemahkan perlawanan. Penyerahan dirinya pada Juli 1963 berlangsung dalam sebuah perayaan rakyat, sebelum akhirnya ia dibawa ke Banjarmasin dan diterbangkan ke Jakarta. Alih-alih menjalani pelatihan, Ibnu Hadjar justru diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mati. Hingga kini, pelaksanaan eksekusi dan lokasi pemakamannya masih belum diketahui secara pasti, menyisakan ruang bagi berbagai spekulasi. Bagi negara, ia dicap pemberontak.⁷⁹ Namun, bagi sebagian masyarakat, khususnya kalangan akar rumput, Ibnu Hadjar dipandang sebagai pejuang yang

⁷⁷ Iqbal, *Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRJT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 98.

⁷⁸ Solahudin, *NII sampai JI*, 69.

⁷⁹ Dijk, *VAN DIJK REBELLION UNDER BANNE*, 268.

memperjuangkan aspirasi rakyat kecil.⁸⁰ Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: benarkah KRIJT merupakan bagian dari Gerakan Politik NII di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo. Bertentangan dengan pandangan resmi pemerintah dan pendapat C. van Dijk, Nazaruddin Sjamsuddin justru menilai bahwa gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan kerap dikaitkan dengan Darul Islam, meskipun pada kenyataannya memiliki sedikit keterkaitan dengan ketiga gerakan utama lainnya. Oleh sebab itu, menurutnya, gerakan di Kalimantan Selatan tidak termasuk dalam struktur resmi Darul Islam Indonesia.⁸¹

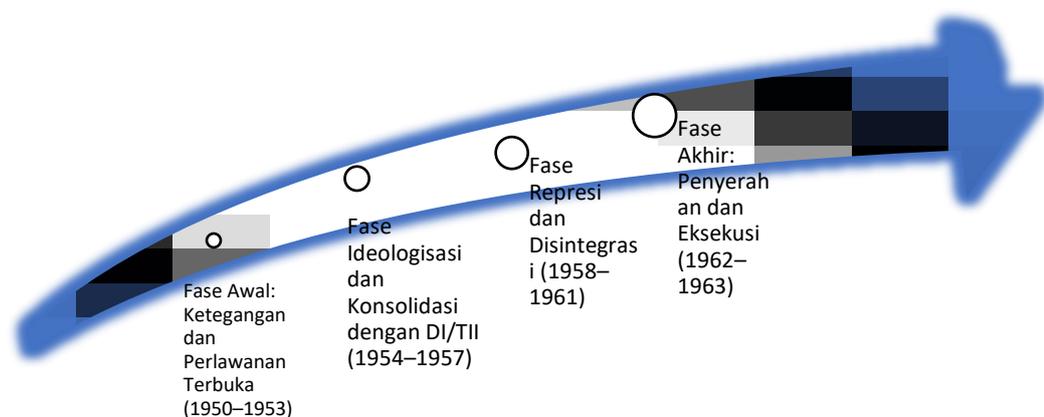
Meskipun Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIJT) memiliki keterkaitan erat dengan gerakan Darul Islam, baik bukti tertulis maupun lisan menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak sepenuhnya linier. Menganggap KRIJT hanya sebagai bagian dari perjuangan NII adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Di Kalimantan Selatan, gagasan pembentukan negara Islam justru lebih dahulu diinisiasi oleh pasukan Darul Islam, bukan oleh Ibnu Hadjar dan kelompoknya. Pemberontakan Ibnu Hadjar sendiri muncul dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam memperlakukan eks pejuang ALRI Divisi IV setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Para pejuang hanya menerima kompensasi seadanya dan dipulangkan ke masyarakat, sementara sejumlah eks aparat kolonial kembali diangkat sebagai pejabat Republik. Jabatan penting di daerah diisi oleh orang-orang dari pusat; Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta dan digantikan oleh Kolonel Sukanda

⁸⁰ Hobsbawm, *On History from Below*, 201.

⁸¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan kaum republik*, 245.

Bratamenggala dari Jawa Barat, dan Gubernur Pangeran Muhammad Noor digantikan oleh Dr. Murjani yang juga berasal dari Jawa. Kecewa dengan realitas itu, masyarakat Kalimantan Selatan melontarkan sindiran tajam: 'Setelah dijajah Belanda, kini dijajah oleh Jawa.'⁸² Meskipun KRjT bersekutu dengan Darul Islam, gerakan ini lebih mencerminkan perlawanan akar rumput yang cenderung bersifat sekuler terhadap dominasi pemerintah pusat. Beragam sebutan yang disematkan kepada kelompok ini mulai dari 'Kesatuan Rakjat Indonesia jang Tertindas', 'Kesatuan Rakjat Islam jang Tertindas', hingga 'Gerombolan Ibnu Hadjar' dan 'Pasukan Islam' menggambarkan kompleksitas dalam memahami identitas serta motivasi KRjT. Untuk menelaah dinamika gerakan ini secara objektif, diperlukan pemahaman mendalam terhadap latar belakang sosial dan budaya yang melingkupi kemunculannya, alih-alih semata-mata terjebak dalam dikotomi antara pemberontak dan pahlawan.

Tahapan Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar



a. Fase Awal: Ketegangan dan Perlawanan Terbuka (1950-1953)

⁸² Iqbal, *Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963*, 8-9.

Fase awal gerakan Ibnu Hadjar (1950–1953) ditandai oleh akumulasi ketegangan antara pemerintah pusat dengan para mantan pejuang laskar rakyat daerah, khususnya Laskar Pangeran Antasari (LPA) yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan. Ketegangan ini bermula dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang menerapkan program rasionalisasi dan demobilisasi terhadap laskar-laskar perjuangan non-regular pasca pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengonsolidasikan kekuatan militer dalam satu komando TNI sebagai angkatan bersenjata negara yang profesional. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak mantan pejuang daerah merasa tersingkir, tidak dihargai, dan diperlakukan tidak adil oleh negara. Ibnu Hadjar termasuk di antara mereka. Ia mengajukan permohonan agar pasukannya diakui sebagai bagian dari TNI, namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan tidak memenuhi standar militer formal, baik dari segi pendidikan, struktur, maupun disiplin. Penolakan tersebut bukan hanya dipandang sebagai bentuk diskriminasi, tetapi juga penghinaan terhadap jasa perjuangan lokal. Akibat dari kekecewaan yang mendalam tersebut, Ibnu Hadjar memilih mengundurkan diri dari struktur negara dan membawa sebagian besar pasukannya masuk ke hutan. Sejak tahun 1950, ia mulai melakukan serangkaian tindakan bersenjata, termasuk penyergapan konvoi militer, perampasan senjata, dan serangan terhadap pos-pos pemerintahan. Gerakan ini berkembang menjadi perlawanan terbuka terhadap otoritas pusat, terutama di wilayah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan sebagian Tabalong.

Perlawanan ini segera dipandang sebagai tindakan kriminal oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 106 KUHP, tindakan tersebut termasuk dalam kategori makar, yaitu “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian dari wilayah negara Indonesia, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.” Pendekatan hukum pidana yang digunakan oleh pemerintah terhadap kasus Ibnu Hadjar mencerminkan paradigma positivistik dalam penegakan hukum, yakni memisahkan aspek hukum formal dari latar belakang sosial-politik yang melatarbelakanginya. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, dalam realitas negara pasca-kolonial, hukum formal sering kali gagal menangkap dinamika keadilan substantif yang menjadi tuntutan masyarakat pinggiran.⁸³ Dari sudut pandang *siyâsah syar’iyyah*, perlawanan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar dapat dipahami sebagai reaksi terhadap ketidakadilan struktural.

Menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan pemerintahan yang tidak menunaikan keadilan adalah bentuk kedzaliman, dan umat berhak untuk menentangnya jika semua jalur musyawarah telah tertutup.⁸⁴ Dalam konteks ini, tindakan Ibnu Hadjar bukan semata-mata pemberontakan, melainkan cerminan dari hilangnya kepercayaan terhadap otoritas negara. Fase awal ini juga memperlihatkan bagaimana ketegangan pusat-daerah, khususnya antara elite militer dari Jawa dengan kekuatan lokal di luar Jawa, menjadi titik krusial dalam pembangunan nasional pasca-kemerdekaan. Gerakan Ibnu Hadjar adalah salah satu ekspresi lokal

⁸³ Wignjosoebroto, *Hukum*, 76.

⁸⁴ Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dan Al-Shaykh Ibrahim Ramadan, *Al-Siyâsah al-shar’iyyah fi Iслаh al-ra’i wa al-ra’iyyah*, 34–35.

dari krisis legitimasi dan kegagalan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki sejarah perjuangan sendiri. Dalam perspektif *Siyâsah syar'iyah*, tindakan perlawanan terhadap pemerintah tidak selalu dikategorikan sebagai *bughât* (pemberontakan) yang terlarang, apabila dapat dibuktikan bahwa pemerintah telah gagal menegakkan keadilan, berlaku *zhalim*, atau menyingkirkan aspirasi umat. Ibnu Taimiyah dalam karyanya *As-Siyâsah Asy-Syar'iyah* menyatakan bahwa kekuasaan yang adil adalah syarat utama legitimasi pemerintahan. Ketika keadilan tidak lagi ditegakkan dan umat tidak memiliki saluran aspirasi, maka penentangan dapat menjadi bentuk perlawanan yang sah.

Bagi Ibnu Hadjar, penolakan pemerintah untuk mengakui jasa dan posisi laskar daerah merupakan bentuk marginalisasi struktural. Ia kemudian memaknai perlawanan bersenjata sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap sistem yang dianggap *zhalim* dan melupakan semangat perjuangan rakyat. Dalam hal ini, gerakan Ibnu Hadjar mengandung dimensi moral dan ideologis yang tidak dapat dilihat secara hitam-putih sebagai tindak kriminal semata.

Fase awal gerakan Ibnu Hadjar (1950–1953) merupakan periode penting yang menunjukkan pergeseran gerakan dari kekecewaan administratif menjadi perlawanan ideologis. Kajian yuridis memposisikan tindakan Ibnu Hadjar sebagai pelanggaran pidana berdasarkan KUHP, sedangkan dalam kajian *Siyâsah syar'iyah*, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih integratif antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif diperlukan dalam menilai fenomena gerakan perlawanan seperti ini.

b. Fase Ideologisasi dan Konsolidasi dengan DI/TII (1954–1957)

Setelah tiga tahun melakukan perlawanan bersenjata secara otonom terhadap pemerintah Republik Indonesia, gerakan yang dipimpin Ibnu Hadjar memasuki fase baru pada 1954–1957. Fase ini ditandai dengan perubahan orientasi dari sekadar perlawanan administratif menjadi perlawanan ideologis berbasis Islam. Di tengah tekanan militer dan politik dari pemerintah pusat, Ibnu Hadjar menjalin hubungan dengan pusat gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Melalui bai'at yang dilakukan secara informal, Ibnu Hadjar menyatakan kesetiaannya kepada Kartosuwiryo sebagai Imam Negara Islam Indonesia (NII), dan menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari wilayah perjuangan NII.

Gerakan Ibnu Hadjar berlangsung antara tahun 1954 hingga 1957 dan merupakan masa penting yang menunjukkan transformasi dari perlawanan bersenjata lokal menjadi bagian dari gerakan ideologis yang lebih besar. Dalam periode ini, Ibnu Hadjar menyatakan bai'at atau sumpah setia kepada Kartosuwiryo, pimpinan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan secara formal menyatukan pasukannya dalam struktur Tentara Islam Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Proklamasi bai'at tersebut menandai pergeseran orientasi perjuangan dari sekadar perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah pusat menjadi perjuangan ideologis untuk menegakkan Negara Islam Indonesia (NII).

Ibnu Hadjar dan para pengikutnya membentuk struktur militer dan pemerintahan tandingan, menerapkan hukum syariat secara terbatas di wilayah-

wilayah yang dikuasai, serta melanjutkan serangkaian aksi bersenjata terhadap pasukan pemerintah. Mereka juga mencetak mata uang sendiri, mendirikan pengadilan syar'i lokal, dan merekrut santri atau dai untuk mengisi struktur keagamaan yang mendukung legitimasi gerakan. Menurut C. Van Dijk, keterkaitan antara faksi-faksi DI/TII seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan bersifat longgar dan lebih ideologis daripada operasional. Ibnu Hadjar tetap mempertahankan otonomi gerakannya, meskipun secara simbolik tunduk kepada Imam Kartosuwiryo.⁸⁵ Konsolidasi ini memperkuat semangat perjuangan, sekaligus memperluas cakupan gerakan menjadi bagian dari agenda nasional penegakan syariat Islam.

Tindakan ini memperlihatkan pergeseran paradigma perlawanan dari gerakan lokal berbasis kekecewaan terhadap ketimpangan pusat-daerah, menjadi bagian dari gerakan nasional Islam politik yang menuntut pendirian negara Islam sebagai alternatif sistem pemerintahan Republik. Ibnu Hadjar pun mengubah struktur organisasinya menjadi bagian dari Tentara Islam Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, membentuk satuan-satuan komando baru, menetapkan sistem hukum internal berbasis syariat, dan mencetak struktur kepemimpinan yang bercorak militer-teokratis.⁸⁶ Dalam hukum positif Indonesia, langkah Ibnu Hadjar memperluas gerakan dan mengintegrasikan diri ke dalam jaringan pemberontakan nasional dianggap sebagai eskalasi delik pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP, yang menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk

⁸⁵ Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, 293–95.

⁸⁶ Pertahanan, *Laporan Penumpasan DI/TII Kalimantan Selatan*, 19–21.

menggulingkan pemerintahan atau memisahkan sebagian wilayah negara dari kekuasaan negara, diancam karena makar dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Bergabungnya Ibnu Hadjar dengan Kartosuwiryo memperkuat argumentasi yuridis negara untuk menindak gerakan ini sebagai bagian dari organisasi makar nasional. Hubungan struktural dengan DI/TII juga menjadikan tindakan perlawanan di Kalimantan Selatan bukan lagi insiden lokal, tetapi sebagai bagian dari ancaman nasional terhadap eksistensi NKRI. Namun, pendekatan yuridis yang represif ini menimbulkan kritik dari berbagai ahli hukum. Prof. Andi Hamzah, misalnya, mengingatkan bahwa penggunaan pasal-pasal makar dalam konteks negara pasca-kolonial harus mempertimbangkan keabsahan aspirasi politik rakyat dan akar ketidakpuasan terhadap pemerintah.⁸⁷ Penafsiran yuridis ini dikuatkan oleh status NII sebagai entitas politik yang bertentangan secara fundamental dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan bergabung ke dalam struktur tersebut, maka gerakan Ibnu Hadjar dianggap sebagai bagian dari organisasi separatis yang mengancam integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Namun demikian, pendekatan hukum pidana yang digunakan oleh negara seringkali mengabaikan kompleksitas sosial, historis, dan ideologis yang melatarbelakangi tindakan perlawanan. Prof. Muladi menekankan bahwa dalam negara yang baru merdeka dan plural secara etnis maupun ideologis, penggunaan

⁸⁷ Hamzah, *Delik-delik Khusus*, 122–23.

hukum pidana sebagai satu-satunya alat kontrol sosial dapat menimbulkan ketimpangan dan alienasi politik yang berbahaya.⁸⁸

Dari perspektif siyâsah syar'iyah, bergabungnya Ibnu Hadjar dengan gerakan Darul Islam dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran politik untuk mencari sistem pemerintahan yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pemikiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, kekuasaan yang sah dalam Islam harus menjamin keadilan, perlindungan hak-hak umat, dan pelaksanaan syariat Islam.⁸⁹ Ketika pemerintahan yang ada dianggap gagal memenuhi prinsip tersebut, umat Islam diberi ruang untuk menuntut perubahan, meskipun idealnya melalui jalur damai dan musyawarah. Dalam konteks Ibnu Hadjar, peralihan dari gerakan lokal menuju gerakan ideologis mencerminkan upaya untuk membingkai perlawanan dalam kerangka syar'i, bukan semata-mata sebagai tindakan kriminal. Ibnu Hadjar mulai menerapkan hukum-hukum Islam di wilayah kekuasaannya, membentuk struktur pemerintahan yang berpola imamah, serta mendidik pasukannya dalam doktrin jihad melawan pemerintah yang dianggap thaghut (zalim). Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa meskipun menuntut penerapan syariat Islam adalah sah, penggunaan kekerasan bersenjata terhadap pemerintahan muslim yang sah hanya dibenarkan jika telah terbukti adanya kezaliman nyata dan tidak ada jalan lain selain angkat senjata.⁹⁰ Dengan demikian, dari perspektif siyâsah syar'iyah,

⁸⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, 172.

⁸⁹ Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 23–25.

⁹⁰ al Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, 1110–15.

gerakan Ibnu Hadjar berada dalam wilayah abu-abu: antara idealisme syariat dan realitas kekerasan politik.

Fase ideologisasi dan konsolidasi dengan DI/TII menunjukkan bahwa gerakan Ibnu Hadjar tidak semata-mata bersifat lokal dan pragmatis, tetapi telah berkembang menjadi gerakan keagamaan yang terstruktur dan terideologisasi. Dalam perspektif hukum positif, hal ini menguatkan posisi negara untuk menindak gerakan tersebut sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah. Namun dalam perspektif siyâsah syar'iyah, gerakan ini dapat pula dilihat sebagai reaksi terhadap kegagalan negara dalam menegakkan keadilan dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap gerakan ini menuntut pendekatan multidimensi, baik secara yuridis, historis, maupun teologis.

c. Fase Represi dan Disintegrasi (1958–1961)

Fase ketiga dalam perjalanan Gerakan Ibnu Hadjar ditandai oleh meningkatnya tekanan militer dari pemerintah pusat terhadap kelompok-kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan Selatan. Rentang waktu 1958–1961 menjadi masa represi sistematis dan melemahnya struktur gerakan. Negara tidak lagi sekadar menanggapi gerakan tersebut sebagai gejala lokal, tetapi sebagai bagian dari ancaman nasional terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Kalimantan Selatan, pemerintah meluncurkan Operasi Militer Terpadu termasuk Operasi Tumpas dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan Ibnu Hadjar dan memutus jejaring militernya dengan pusat DI/TII Kartosuwiryo. Operasi militer ini didukung oleh

pengerahan pasukan besar dan kerja sama intelijen dari TNI dan aparat sipil, yang mempersempit ruang gerak para pemberontak.⁹¹

Akibatnya, kekuatan Ibnu Hadjar terdesak ke wilayah-wilayah pedalaman Pegunungan Meratus. Disiplin internal merosot, logistik terbatas, dan banyak pengikutnya menyerah atau tertangkap. Wilayah operasi menjadi semakin sempit dan terfragmentasi. Dalam kondisi ini, gerakan kehilangan basis sosialnya karena rakyat mulai takut terjebak dalam konflik bersenjata, terlebih dengan adanya tekanan dari aparat negara.

Dari perspektif hukum positif, fase ini memperlihatkan bagaimana pemerintah secara agresif menerapkan Pasal 108 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang turut serta dalam pemberontakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian wilayah negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Selain itu, mereka yang memberikan perlindungan atau bantuan logistik kepada kelompok Ibnu Hadjar dikenai Pasal 110 KUHP, yakni persekongkolan jahat terhadap negara. Pemerintah juga memberlakukan hukum darurat melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957, yang memberikan kewenangan luar biasa kepada militer dan aparat keamanan untuk menangkap dan mengadili tersangka pemberontakan tanpa proses peradilan sipil biasa. Langkah-langkah represif ini memperlihatkan penerapan hukum dalam kerangka pemeliharaan ketertiban umum (*law and order*), namun menimbulkan konsekuensi berupa pembungkaman aspirasi politik dan penyederhanaan akar masalah sebagai sekadar pelanggaran hukum pidana.

⁹¹ Pertahanan, *Laporan Penumpasan DI/TII Kalimantan Selatan*, 27–31.

Pendekatan yang terlalu mengandalkan alat negara tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial-ekonomi dan marginalisasi daerah justru memperdalam luka historis dan trauma kolektif masyarakat lokal.

Dalam kerangka siyâsah syar'iyah, fase represi ini menunjukkan lemahnya prinsip islah (perbaikan) dalam relasi antara ulil amri (penguasa) dan umat. Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah ideal harus senantiasa membuka jalur musyawarah dan menghindari tindakan zalim kepada rakyat, termasuk dalam menangani penyimpangan atau pembangkangan.⁹² Penumpasan terhadap gerakan bersenjata memang dapat dibenarkan dalam konteks darurat (*al-dharuriyat al-khams*), tetapi syariat menekankan bahwa pencegahan fitnah dan kerusakan sosial lebih utama daripada sekadar penghukuman. Dalam konteks ini, pendekatan koersif oleh pemerintah terhadap Ibnu Hadjar dapat dipahami sebagai reaksi negara terhadap ancaman keamanan. Namun, dalam perspektif siyâsah syar'iyah, tindakan kekerasan harus tetap proporsional, adil, dan tidak melampaui batas. Al-Ghazali menegaskan bahwa negara harus membedakan antara penegakan hukum dan tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip keadilan substansial.⁹³

Sementara itu, di internal gerakan Ibnu Hadjar, terjadi degradasi semangat ideologis. Kesulitan logistik, penurunan loyalitas, dan menurunnya dukungan masyarakat menandai fase disintegrasi gerakan. Ini mengindikasikan bahwa legitimasi sosial dan spiritual gerakan juga mengalami krisis. Dalam siyâsah

⁹² Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dan Al-Shaykh Ibrahim Ramadan, *Al-Siyâsah al-shar'iyah fi Islah al-ra'i wa al-ra'iyah*, 41–43.

⁹³ Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, 286–87.

syar'iyah, hal ini disebut sebagai *inhilal al-'aqd* (runtuhnya kontrak sosial antara pemimpin dan umat).

Fase represi dan disintegrasi (1958–1961) merupakan puncak dari konfrontasi antara negara dan Gerakan Ibnu Hadjar. Dari perspektif hukum positif, ini adalah periode dominasi tindakan represif berbasis undang-undang makar dan keadaan darurat. Sementara dari perspektif *siyâsah syar'iyah*, ini merupakan kegagalan dua arah: kegagalan negara dalam membuka jalur islah dan kegagalan gerakan dalam menjaga legitimasi *syar'i* dan sosial. Maka, fase ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik bersenjata tidak cukup dengan pendekatan militeristik dan hukum represif, tetapi juga menuntut pendekatan moral, dialog, dan keadilan sosial yang menyeluruh.

d. Fase Akhir: Penyerahan dan Eksekusi (1962–1963)

Setelah lebih dari satu dekade bergerilya di pedalaman Kalimantan Selatan, kekuatan militer dan politik Gerakan Ibnu Hadjar mengalami kemunduran drastis. Penurunan moral pasukan, hilangnya dukungan masyarakat, serta tekanan militer dari pemerintah pusat yang intensif melalui Operasi Tumpas menyebabkan gerakan tersebut kehilangan basis logistik dan ideologis. Dalam kondisi demikian, Ibnu Hadjar akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah pada tahun 1962 sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan diri dan sisa pasukannya dari kehancuran total.

Penyerahan Ibnu Hadjar tidak disertai dengan perjanjian damai atau jaminan amnesti politik seperti yang terjadi dalam penyelesaian konflik DI/TII Aceh. Pemerintah memilih jalur hukum pidana untuk memproses kasus ini. Ia kemudian ditangkap, diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, dan dijatuhi hukuman mati

atas tuduhan makar, pemberontakan, dan pembunuhan terhadap aparat negara. Eksekusi dilaksanakan pada tahun 1963, menjadikan Ibnu Hadjar sebagai salah satu tokoh Islam bersenjata yang dihukum mati oleh negara setelah Kartosuwiryo. Dalam proses peradilannya, Ibnu Hadjar dikenakan dakwaan utama berupa makar dan pemberontakan bersenjata berdasarkan Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 KUHP, dengan tambahan tindak pidana konspirasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP. Pengadilan militer menyatakan bahwa tindakan Ibnu Hadjar bukan hanya melawan pemerintah yang sah, tetapi juga membahayakan integritas negara dan ketertiban umum. Dalam putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan vonis hukuman mati. Eksekusi dilakukan pada tahun 1963, menjadikan Ibnu Hadjar salah satu dari segelintir pemimpin perlawanan Islam di luar Jawa yang dieksekusi oleh negara pasca kemerdekaan. Berbeda dengan kasus Kartosuwiryo yang juga dihukum mati, namun setelah proses panjang dan upaya diplomatik, eksekusi terhadap Ibnu Hadjar berlangsung relatif cepat dan minim pemberitaan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memanfaatkan kewenangan darurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, yang memberi kewenangan luas kepada aparat militer untuk menangani pemberontakan tanpa mekanisme peradilan sipil biasa

Pendekatan hukum ini memperlihatkan penegasan negara terhadap supremasi hukum dan kewibawaan konstitusional. Namun demikian, sejumlah pakar hukum menilai bahwa tindakan represif ini kehilangan nuansa keadilan transisional. Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana semestinya tidak hanya bersifat pembalasan (retributif), tetapi juga mengandung dimensi pemulihan sosial

dan rehabilitasi politik.⁹⁴ Dalam perspektif siyâsah syar'iyah, penyerahan diri oleh seorang pemimpin perlawanan seharusnya menjadi momen islah (rekonsiliasi) antara penguasa dan umat. Sejumlah literatur klasik Islam menekankan pentingnya memberi ruang bagi pemberontak (bughât) yang telah menyerah dan menghentikan tindakan bersenjata. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seorang pemimpin diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa menghukum para bughât bila mereka sudah kembali ke jalan yang benar dan bersedia tunduk kepada pemerintah.⁹⁵ Dalam sejarah Islam, banyak contoh ketika pemerintah memilih memberi ampunan kepada pemberontak yang telah menyerah dan bertobat, terutama bila mereka menunjukkan niat kembali kepada jalan damai. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menekankan pentingnya ta'zir yang bersifat edukatif daripada hudud yang semata menghukum, jika masalah publik lebih tercapai melalui pemaafan.⁹⁶ Dalam kasus Ibnu Hadjar, pemerintah tidak menggunakan pendekatan al-shulh wa al-mushalahah (perdamaian restoratif), tetapi memilih jalur al-'uqubah (hukuman). Hal ini menimbulkan pertanyaan etis: apakah eksekusi terhadap seorang pemimpin yang telah menyerah adalah tindakan yang adil secara syar'i dan masalah secara politik? Dalam konteks tersebut, keputusan eksekusi terhadap Ibnu Hadjar dapat dilihat sebagai hilangnya peluang emas untuk membangun jembatan rekonsiliasi antara negara dan komunitas Islam lokal di Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, dalam tradisi fiqh al-Siyâsah, eksekusi terhadap pemimpin bughât yang telah menyerah dinilai hanya sah apabila mereka tetap menolak tunduk pada

⁹⁴ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (1996), 58–59.

⁹⁵ Taimiyah, *As-Siyâsah Asy-Syar'iyah fi Islahir Ra'i war-Ra'iyah*, 42–43.

⁹⁶ al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 15.

otoritas negara dan terus melakukan kerusakan (*fasad fi al-ardh*).⁹⁷ Dalam kasus Ibnu Hadjar, setelah penyerahan, tidak ada indikasi perlawanan lanjutan, sehingga argumentasi untuk menghukumnya mati menjadi lemah jika ditinjau dari sisi masalah *syar'i*. Eksekusi Ibnu Hadjar, jika dilihat dari sudut sejarah dan keadilan politik, berbeda dengan penyelesaian konflik serupa di Aceh dan Sulawesi Selatan. Di Aceh, misalnya, pemerintah memberikan status Daerah Istimewa kepada wilayah tersebut setelah perlawanan Daud Beureueh, sebagai bentuk kompromi politik dan kultural. Sementara di Kalimantan Selatan, tidak ada kebijakan akomodatif yang mengiringi berakhirnya konflik.

Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan negara terhadap konflik bersenjata Islam tidak seragam dan lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan persepsi ancaman. Dalam konteks ini, Ibnu Hadjar menjadi simbol dari eksekusi pendekatan hukum pidana yang rigid tanpa dialog sosial-kultural yang memadai. Hal ini berisiko menciptakan luka sejarah kolektif di masyarakat lokal yang merasa tidak diberi ruang untuk berkompromi dalam tatanan negara baru pasca kolonial.

Fase penyerahan dan eksekusi Ibnu Hadjar (1962–1963) menandai akhir dari salah satu gerakan perlawanan Islam bersenjata paling signifikan di Kalimantan. Negara memilih pendekatan penegakan hukum maksimalis, dengan mengeksekusi pemimpinnya melalui proses Mahkamah Militer. Secara yuridis, hal ini mencerminkan supremasi hukum dan konsistensi negara dalam memberantas makar. Namun secara *siyâsah syar'iyah*, tindakan tersebut dinilai mengabaikan peluang rekonsiliasi, keadilan restoratif, dan prinsip masalah umat. Dengan

⁹⁷ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-adillatuh*, 5005–6.

demikian, penilaian terhadap fase ini menuntut pendekatan multidisipliner, yaitu antara hukum positif dan keadilan Islam, antara stabilitas negara dan pemulihan hubungan sosial. Kegagalan menyatukan dua pendekatan ini menyebabkan proses penegakan hukum kehilangan aspek kemanusiaannya.

D. Analisis Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar

Pengabaian terhadap Peran Pejuang Lokal sebagai Faktor Pendorong Deprivasi Sosial-Politik

Salah satu dimensi yang krusial dalam memahami munculnya gerakan perlawanan di bawah komando Ibnu Hadjar terletak pada dinamika frustrasi kolektif yang dialami oleh para pejuang lokal, terutama setelah kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda pada tahun 1949. Ketidakpuasan ini muncul sebagai akibat dari tidak diakuinya peran vital yang dimainkan oleh kelompok-kelompok lokal dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Pada masa revolusi fisik, banyak individu dari kalangan pesantren, masyarakat pedesaan, serta para ulama, terlibat aktif dalam perang gerilya menghadapi tentara kolonial Belanda. Namun, ironi sejarah terjadi ketika mereka yang dahulu berada di garis depan perlawanan justru disisihkan dari struktur formal negara yang terbentuk pascakemerdekaan.⁹⁸

Divisi Lambung Mangkurat menjadi contoh nyata dari proses marginalisasi ini. Satuan militer lokal yang sempat menjadi kekuatan signifikan dalam melawan penjajah tersebut mengalami pembubaran secara sepihak oleh pemerintah pusat ketika proses konsolidasi militer nasional berlangsung. Dengan dibentuknya

⁹⁸ Nawawi, *Perlawanan Lokal di Kalimantan Selatan: Kasus Ibnu Hadjar*, 53–55.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi militer tunggal, berbagai kekuatan bersenjata lokal seperti Lambung Mangkurat tidak diberikan ruang untuk berintegrasi secara adil dan bermartabat. Proses sentralisasi ini memunculkan kekecewaan yang mendalam, terlebih karena sebagian besar mantan pejuang tidak diterima kembali dalam struktur militer nasional, sedangkan para pemimpinnya termasuk Ibnu Hadjar tidak mendapatkan pengakuan atau posisi yang setimpal dengan kontribusi mereka selama masa perjuangan.⁹⁹

Kondisi tersebut melahirkan luka sosial dan psikologis yang kompleks. Para mantan pejuang merasa bahwa pengorbanan dan perjuangan yang mereka lakukan telah diabaikan, bahkan dilupakan oleh negara yang mereka bela. Lebih dari sekadar kehilangan jabatan atau kekuasaan, mereka merasa dirampas dari makna perjuangan itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, konsep deprivasi relatif sebagaimana dijelaskan oleh Ted Robert Gurr menjadi sangat relevan. Gurr menekankan bahwa pemberontakan sering kali dilatarbelakangi oleh rasa kehilangan hak atau status yang sebelumnya pernah dimiliki, bukan semata-mata karena kemiskinan atau kekurangan material.¹⁰⁰ Dalam kerangka ini, mantan anggota Divisi Lambung Mangkurat dan pejuang lokal lainnya mengalami pergeseran status sosial yang drastis. Mereka sebelumnya berada dalam posisi terhormat sebagai pembela tanah air, namun pascakemerdekaan menjadi kelompok yang termarjinalkan secara politik dan ekonomi. Ketika mereka menyaksikan elit-elit politik dari pusat memperoleh kedudukan tinggi dalam

⁹⁹ Lapijan, *Gerakan Darul Islam dan Pemerintah Pusat: Ketegangan dan Akomodasi*, 79.

¹⁰⁰ Gur, *Why Men Rebel*, 13–14.

struktur pemerintahan dan militer, sementara mereka sendiri tersingkir tanpa penghargaan, timbul kesenjangan antara ekspektasi dan realitas yang disebut oleh James C. Davies sebagai “J-Curve”.¹⁰¹ Kekecewaan ini menciptakan rasa ketidakadilan struktural, yang oleh Gurr disebut sebagai “perceived injustice” yakni persepsi akan adanya perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok tertentu oleh struktur kekuasaan yang dominan.¹⁰²

Lebih lanjut, pengabaian terhadap peran lokal ini dapat dimaknai pula sebagai bentuk penghapusan terhadap memori kolektif dan sejarah perjuangan dari pinggiran. Dalam narasi sejarah nasional yang dibangun secara terpusat, kontribusi daerah-daerah seperti Kalimantan Selatan tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Hal ini menciptakan apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai marginalisasi historis, yakni penghapusan pengalaman kolektif daerah dari ingatan nasional. Dalam hal ini, negara bukan hanya menyingkirkan aktor-aktor lokal dari struktur kekuasaan, tetapi juga secara simbolik menafikan eksistensi dan legitimasi perjuangan mereka dari sejarah resmi bangsa.

Akumulasi dari rasa kecewa, frustrasi, dan terasing dari narasi besar bangsa inilah yang kemudian menjadi benih dari tindakan perlawanan bersenjata. Gerakan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar bukanlah sekadar ekspresi kebencian terhadap negara atau tindakan kriminal semata, melainkan bentuk artikulasi politik dari identitas yang terpinggirkan dan martabat yang ingin dipulihkan. Gerakan tersebut merupakan respon terhadap pengabaian struktural yang

¹⁰¹ Davies, *Toward a Theory of Revolution*, 5.

¹⁰² Gur, *Why Men Rebel*, 33–34.

sistematis, baik secara material, simbolik, maupun historis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengabaian terhadap peran pejuang lokal merupakan salah satu akar utama dari deprivasi yang mendorong munculnya resistensi, yang oleh negara kemudian dikategorikan sebagai bentuk makar atau bughât.

Gejala deprivasi yang dialami oleh Ibnu Hadjar beserta kelompoknya bukanlah semata-mata bentuk ketidakpuasan yang bersifat pribadi atau psikologis individual, melainkan telah menjelma menjadi ekspresi kolektif yang terstruktur dan berorientasi pada perubahan sosial-politik. Ketika kekecewaan dan frustrasi tidak hanya dirasakan secara personal tetapi juga terinternalisasi oleh komunitas tertentu sebagai pengalaman bersama, maka ketidakpuasan itu cenderung berubah menjadi sebuah gerakan yang memiliki arah, tujuan, dan strategi yang jelas. Dalam kerangka teori deprivasi relatif yang dirumuskan oleh Ted Robert Gurr, terdapat korelasi kuat antara perasaan kehilangan atau ketertinggalan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai hak atau aspirasi sah, dengan potensi timbulnya tindakan kekerasan politik.¹⁰³ Deprivasi relatif merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok membandingkan kondisi aktual yang mereka alami dengan kondisi ideal atau yang mereka anggap seharusnya mereka capai, lalu menemukan adanya jurang yang signifikan antara harapan dan kenyataan tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Gur, *Why Men Rebel*, 13.

¹⁰⁴ Gur, *Why Men Rebel*, 24.

Pada kasus Ibnu Hadjar, eksklusi dari struktur kekuasaan formal pasca kemerdekaan, serta pengabaian terhadap kontribusi nyata kelompok-kelompok lokal dalam perjuangan bersenjata di Kalimantan Selatan, memperkuat persepsi bahwa negara telah gagal mengakui dan memenuhi hak-hak dasar mereka. Ketiadaan akses terhadap mekanisme legal dan kanal politik yang adil memperparah keadaan tersebut. Ketika saluran institusional seperti hukum, partai politik, atau forum konsultasi tidak memberikan ruang representasi yang memadai, maka muncul dorongan kuat dari dalam kelompok untuk mencari jalan lain, termasuk melalui gerakan perlawanan yang berwatak militan.

Tindakan kolektif yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar pada akhirnya dapat dipahami sebagai respons langsung terhadap akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan yang tidak pernah tersalurkan secara konstruktif. Frustrasi kolektif tersebut bukan hanya berasal dari perbedaan ekonomi atau status sosial, tetapi terutama dari ketimpangan dalam distribusi kehormatan, pengakuan, dan peran strategis dalam tatanan negara yang baru terbentuk. Dengan kata lain, tindakan perlawanan ini merupakan bentuk artikulasi dari krisis legitimasi negara di mata sebagian rakyatnya, khususnya mereka yang merasa dikorbankan demi konsolidasi kekuasaan nasional pasca pengakuan kedaulatan.¹⁰⁵

Seperti yang diungkapkan Gurr, semakin besar kesenjangan antara ekspektasi normatif kelompok terhadap hak-hak mereka dengan realitas objektif yang mereka hadapi, dan semakin kecil peluang untuk mengubah keadaan itu secara damai, maka kemungkinan untuk munculnya pemberontakan atau aksi kekerasan

¹⁰⁵ Helius, *Pemberontakan Politik di Kalimantan Selatan 1950–1959*, 120–22.

politik akan semakin tinggi.¹⁰⁶ Ibnu Hadjar dan para pengikutnya tampaknya telah mencapai ambang batas ini, sehingga mereka memilih jalur resistensi yang radikal sebagai bentuk klaim terhadap keadilan dan pengakuan yang telah lama diabaikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menapaki jalan perlawanan, Ibnu Hadjar tidak bertindak secara mendadak, emosional, atau tanpa arah. Pergerakan yang ia pimpin menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan strategi yang terukur. Alih-alih melakukan aksi-aksi acak, Ibnu Hadjar justru membangun basis kekuatan dengan menghimpun kembali para mantan pejuang dari Divisi Lambung Mangkurat unit militer lokal yang pernah berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Upaya ini merupakan bentuk konsolidasi sumber daya manusia dan militer, yang kemudian diperluas melalui pembentukan jaringan bersenjata yang terorganisir.¹⁰⁷ Lebih dari sekadar penyatuan kekuatan lokal, Ibnu Hadjar juga menjalin aliansi strategis dengan gerakan yang memiliki afiliasi ideologis serupa, yakni Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang saat itu tengah aktif di berbagai daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara pusat yang sekuler dan sentralistik.¹⁰⁸

Langkah-langkah tersebut bukan merupakan cerminan dari ambisi pribadi semata, melainkan dilandasi oleh kesadaran kolektif dari kelompok sosial yang merasa terpinggirkan dalam struktur kekuasaan nasional pasca-kemerdekaan. Ketimpangan distribusi peran, simbol, dan legitimasi antara pusat dan daerah telah

¹⁰⁶ Gur, *Why Men Rebel*, 35–36.

¹⁰⁷ Helius, *Pemberontakan Politik di Kalimantan Selatan 1950–1959*, 134–36.

¹⁰⁸ Solahudin, *NII sampai JI*, 72.

menciptakan kondisi marginalisasi yang bersifat sistemik. Dalam kondisi semacam itu, gerakan perlawanan seperti yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar bukan hanya menjadi respons terhadap ketidakadilan konkret, tetapi juga artikulasi dari luka simbolik yang dirasakan oleh kelompok-kelompok lokal yang pernah berjuang namun kemudian diabaikan oleh negara.¹⁰⁹

Masuknya Ibnu Hadjar ke dalam struktur gerakan DI/TII menandai pergeseran orientasi perlawanan dari semata-mata bersifat regional ke arah yang lebih ideologis. Islam tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural atau spiritual, tetapi juga sebagai perangkat wacana untuk mengkonseptualisasikan perlawanan politik. Dalam konteks ini, syariat Islam dijadikan sebagai narasi tandingan terhadap sistem negara yang dianggap telah melenceng dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterwakilan umat. Islam menjadi kerangka moral yang melegitimasi tindakan mereka, serta memperkuat solidaritas internal kelompok perlawanan. Dengan demikian, afiliasi Ibnu Hadjar dengan DI/TII tidak semata-mata memperluas jaringan politik-militer, tetapi juga memberi landasan ideologis yang memperdalam makna perjuangan mereka.¹¹⁰

Dorongan untuk membentuk suatu tatanan sosial-politik baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak dapat dipandang hanya sebagai ekspresi religius semata, melainkan sebagai respons ideologis yang terstruktur terhadap pengalaman deprivasi yang dialami secara kolektif oleh kelompok Ibnu Hadjar. Aspirasi ini muncul dalam konteks ketidakpuasan yang mendalam terhadap

¹⁰⁹ *Islamic State or State Islam?*, 43–45.

¹¹⁰ Gur, *Why Men Rebel*, 38.

sistem kenegaraan yang dirancang oleh pemerintah pusat pasca-kemerdekaan, yang dipersepsikan gagal mengakomodasi kepentingan dan identitas kelompok-kelompok lokal, khususnya yang berakar pada perjuangan Islam dan kedaerahan. Dalam hal ini, Ibnu Hadjar bukan sekadar tampil sebagai penentang terhadap kebijakan negara, tetapi menjelma menjadi simbol perlawanan yang membawa misi perubahan fundamental atas struktur kekuasaan yang mapan.

Sikap penolakannya terhadap bentuk negara yang dianut pemerintah pusat mencerminkan karakter seorang aktor sosial yang tidak puas hanya dengan melakukan resistensi pasif, tetapi aktif membangun suatu visi alternatif tentang kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Islam dijadikan sebagai basis moral dan ideologis untuk mendefinisikan ulang konsep keadilan, kepemimpinan, serta kedaulatan yang dianggap telah disimpangkan oleh rezim sekuler. Dengan demikian, gerakan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar tidak hanya memuat dimensi militeristik, tetapi juga mengandung proyek ideologis yang mendalam, yaitu menggantikan sistem yang eksisting dengan tatanan yang lebih sesuai dengan keyakinan normatif mereka.

Apa yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar sejalan dengan teori gerakan sosial yang menekankan bahwa kelompok-kelompok yang mengalami deprivasi simbolik dan marginalisasi struktural cenderung mengembangkan sistem nilai alternatif sebagai bentuk perlawanan kultural dan politik terhadap hegemoni negara. Dalam pandangan ini, gerakan sosial bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga produktif yakni memproduksi narasi tandingan yang menantang legitimasi struktur yang ada. Oleh karena itu, langkah Ibnu Hadjar untuk menyandingkan perjuangan

politik dengan basis ideologi Islam dapat dipahami sebagai upaya artikulatif dalam menciptakan “tatanan simbolik baru” yang mampu memberi makna dan harapan bagi komunitas yang merasa tersisih oleh arus sentralisasi kekuasaan.¹¹¹

Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar dapat dibaca sebagai cerminan dari dinamika *new social movements* (gerakan sosial baru), di mana motivasi utama perjuangan tidak lagi hanya berkisar pada tuntutan ekonomi material atau perebutan kekuasaan politik formal. Sebaliknya, gerakan ini bertumpu pada pencarian identitas kolektif, tuntutan atas pengakuan sosial, serta perjuangan moral demi keadilan substantif. Dalam kerangka ini, tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok Ibnu Hadjar merupakan ekspresi dari kehendak untuk mengembalikan martabat yang dirasa telah dirampas oleh sistem negara yang sentralistik dan diskriminatif.

Ciri khas dari gerakan sosial baru adalah kecenderungan untuk menanggapi krisis representasi yaitu ketika saluran-saluran legal dan institusional tidak lagi mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Perlawanan yang dilakukan Ibnu Hadjar muncul dari ketegangan antara ekspektasi terhadap keadilan pasca-kemerdekaan dan realitas struktural yang menciptakan kesenjangan, eksklusivitas, serta ketidaksetaraan perlakuan terhadap para pejuang lokal. Negara, yang secara normatif semestinya menjadi instrumen perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga, dalam praktiknya justru tampil sebagai entitas dominan yang mereproduksi ketidakadilan melalui mekanisme birokrasi dan militer.

¹¹¹ Gur, *Why Men Rebel*, 37–39.

Gerakan ini dapat pula dibaca sebagai bentuk radikalisme dari rasa frustrasi sosial yang mengalami kebuntuan politik. Ketika ruang partisipasi politik tertutup dan tidak tersedia kanal legitim untuk mengekspresikan kekecewaan, maka gerakan kolektif kerap mengambil bentuk yang lebih konfrontatif. Dalam konteks ini, perlawanan Ibnu Hadjar bukanlah bentuk anarkisme tanpa arah, tetapi lahir dari akumulasi pengalaman ketidakadilan yang tidak terselesaikan secara institusional. Hal ini memberikan gambaran bahwa perjuangan tersebut memiliki dimensi simbolik yang kuat: ia tidak hanya menuntut distribusi kekuasaan atau sumber daya, tetapi juga memperjuangkan tempat dan makna atas identitas sosial mereka dalam konstruksi negara-bangsa Indonesia yang baru terbentuk.¹¹²

Gejala deprivasi yang dialami oleh Ibnu Hadjar dan kelompoknya tidak berhenti pada bentuk ketidakpuasan laten atau kekecewaan individual yang pasif, melainkan mengalami evolusi menjadi sebuah tindakan kolektif yang terorganisasi dan militan. Situasi ini muncul sebagai akibat dari tertutupnya ruang dialog politik dan ketiadaan mekanisme negosiasi yang inklusif dari pihak negara terhadap eks-pejuang lokal. Ketika saluran institusional gagal menampung aspirasi dan keluhan mereka, respons yang muncul pun tidak lagi bersifat inkremental, tetapi radikal dan konfrontatif. Dalam kerangka teori deprivasi relatif yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr, konflik sosial dan kekerasan politik kerap kali merupakan hasil dari kesenjangan antara harapan (*value expectations*) dan kenyataan (*value capabilities*) yang dirasakan oleh kelompok masyarakat

¹¹² Melucci dkk., *Nomads of the Present*, 29–31.

tertentu.¹¹³ Ketika ekspektasi akan pengakuan, kesejahteraan, atau partisipasi politik tidak tercapai, sedangkan kelompok lain menikmati akses terhadap sumber daya tersebut, maka muncul kondisi psikologis kolektif berupa frustrasi yang terakumulasi.¹¹⁴ Jika frustrasi ini tidak dikelola melalui mekanisme legal atau institusional, maka besar kemungkinan akan berkembang menjadi aksi perlawanan.

Ibnu Hadjar menanggapi kondisi tersebut dengan cara membentuk struktur militer alternatif dan memanfaatkan simbol-simbol religius sebagai sumber legitimasi gerakan. Klaim sebagai pejuang penegak syariat Islam tidak hanya memperkuat posisi ideologis kelompoknya, tetapi juga memberi justifikasi moral terhadap tindakan bersenjata yang dilakukan. Dengan kata lain, gerakan tersebut telah melewati batas ketidakpuasan yang pasif dan memasuki ranah perlawanan aktif yang bersifat frontal terhadap negara. Penolakan terhadap sistem politik yang dibangun oleh negara pasca-kemerdekaan dipadukan dengan narasi keagamaan sebagai sarana untuk menegaskan eksistensi dan menantang struktur dominan.

Kondisi ini mengonfirmasi salah satu tesis utama dalam teori gerakan sosial baru (*new social movements*), yakni bahwa mobilisasi tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi atau kekuasaan, melainkan oleh pencarian akan pengakuan identitas, keadilan moral, dan rekonstruksi nilai-nilai sosial.¹¹⁵ Dalam konteks ini, deprivasi yang dialami bukan hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan eksistensial. Negara yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator

¹¹³ Gur, *Why Men Rebel*, 24–25.

¹¹⁴ Davies, *Toward a Theory of Revolution*, 19.

¹¹⁵ Melucci, *Challenging Codes*, 70–73.

rekonsiliasi pascakonflik justru dipersepsikan sebagai entitas represif yang memperpanjang ketimpangan dan pengucilan politik terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, kekerasan menjadi bentuk artikulasi politik dari frustrasi kolektif yang tidak menemukan ruang legal.

Perlawanan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum negara atau tindakan kriminal individual. Sebaliknya, gerakan tersebut harus dilihat sebagai respons yang terstruktur dan bermakna terhadap kondisi sosial-politik yang dialami kelompoknya, terutama dalam hal pengabaian representasi dan keadilan struktural. Dalam perspektif teori deprivasi relatif yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr, potensi munculnya tindakan kekerasan politik tidak semata ditentukan oleh kemiskinan absolut atau penderitaan material, melainkan lebih dipicu oleh persepsi kehilangan terhadap hak, status, dan prospek masa depan yang dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu.¹¹⁶

Gurr menekankan bahwa ketika terdapat jarak yang signifikan antara harapan yang diinternalisasi oleh suatu kelompok (*value expectations*) dan realitas yang mereka alami (*value capabilities*), maka potensi frustrasi kolektif akan meningkat, dan hal tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan politik. Dalam hal ini, Ibnu Hadjar dan para pengikutnya merasakan bahwa kontribusi dan perjuangan mereka selama revolusi kemerdekaan tidak mendapatkan pengakuan atau imbal balik yang setara dari negara. Harapan akan diikutsertakan dalam sistem kekuasaan pascakolonial tidak terwujud, bahkan mereka justru tersisih dari arus utama

¹¹⁶ Gur, *Why Men Rebel*, 24–25.

pembangunan nasional. Kondisi ini memicu krisis representasi yang akut, di mana kelompok tersebut merasa kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka secara legal dan konstitusional.

Perasaan "terputus dari narasi kebangsaan" ini memperkuat persepsi bahwa negara telah gagal memenuhi kontrak sosial yang seharusnya berlaku secara adil bagi semua warganya. Oleh karena itu, tindakan perlawanan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar dapat dilihat sebagai manifestasi dari krisis legitimasi yang lebih dalam, yakni ketika sebagian warga negara merasa tidak lagi memiliki tempat yang sah dalam struktur sosial-politik yang dibentuk oleh negara pascakemerdekaan.¹¹⁷ Gerakan mereka merupakan artikulasi rasional dari kelompok yang tidak hanya mengalami marginalisasi struktural, tetapi juga penyingkiran simbolik dari pusat kekuasaan nasional. Dalam konteks inilah, perlawanan menjadi bukan sekadar pilihan, tetapi bentuk ekspresi eksistensial dari kelompok yang mencari pengakuan, keadilan, dan tempat dalam peta kebangsaan.

Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar dan kelompoknya bukan sekadar tindakan reaktif yang dilandasi oleh kepentingan personal atau dorongan ambisi kekuasaan. Sebaliknya, tindakan tersebut merepresentasikan artikulasi yang lebih kompleks dari akumulasi kekecewaan kolektif terhadap sistem politik dan sosial yang dianggap tidak responsif dan eksklusif. Dalam kerangka teori deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr, gerakan semacam ini muncul bukan karena kemiskinan absolut atau represi yang ekstrem, melainkan

¹¹⁷ Tilly, "From Mobilization to Revolution," 57–60.

karena persepsi kehilangan status, harapan, dan hak-hak yang sah secara moral baik sebagai warga negara maupun sebagai eks-pejuang kemerdekaan.¹¹⁸

Gerakan Ibnu Hadjar, dalam konteks tersebut, dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap negara yang gagal menyerap dan mengakui kontribusi politik serta jasa historis masyarakat lokal Kalimantan Selatan. Perasaan terpinggirkan dari narasi nasional dan minimnya keterlibatan dalam proses-proses pengambilan kebijakan pascakemerdekaan menjadikan frustrasi ini berkembang menjadi bentuk mobilisasi kolektif. Gurr menyatakan bahwa “deprivasi relatif terjadi ketika ada ketimpangan antara harapan (*value expectations*) dan kenyataan aktual (*value capabilities*)”, dan dalam situasi seperti itu, potensi kekerasan politik meningkat secara signifikan.

Ketimpangan distribusi kekuasaan antara pusat dan daerah, serta eksklusi terhadap para eks-pejuang lokal seperti mantan anggota Divisi Lambung Mangkurat, turut menciptakan kondisi yang subur bagi lahirnya rasa keterasingan dan delegitimasi terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini, perlawanan Ibnu Hadjar bisa dilihat sebagai upaya untuk memulihkan kehormatan kolektif, memperjuangkan kembali ruang representasi, dan menolak dominasi sistem politik yang dirasakan tidak adil dan tidak akomodatif.

Gerakan ini juga merupakan bentuk resistensi dari pinggiran terhadap hegemoni pusat yang selama ini mengklaim monopoli atas arah politik nasional. Dalam banyak kasus pascakolonial, negara sering kali gagal menjembatani kesenjangan antara retorika kemerdekaan dan realitas distribusi kekuasaan yang

¹¹⁸ Gur, *Why Men Rebel*, 24–25.

tidak merata. Oleh karena itu, pemberontakan semacam ini adalah ekspresi dari krisis legitimasi yang lebih dalam, di mana sebagian rakyat merasa tercerabut dari konstruksi kenegaraan yang baru. Ibnu Hadjar, dalam konteks ini, bukan hanya pemberontak dalam kacamata hukum positif, melainkan aktor yang sedang memperjuangkan alternatif tatanan yang dianggap lebih adil dan inklusif.¹¹⁹ Dengan demikian, perlawanan ini tidak bisa dipahami semata sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikator penting dari kegagalan struktural negara dalam membangun rekonsiliasi sosial-politik pascakemerdekaan. Ketika dialog politik dibungkam dan representasi dipersempit, maka kekerasan politik menjadi saluran ekspresi yang tersisa. Dalam kasus Ibnu Hadjar, gerakan bersenjata menjadi cara untuk menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang tidak lagi bisa ditoleransi, dan bahwa sistem telah kehilangan kemampuan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat secara bermartabat.¹²⁰

¹¹⁹ *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*, 85–87.

¹²⁰ *Modernity at Large*, 142–44.